LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2025

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

Laporan Keuangan dan
Catatan Laporan Keuangan (CALK)
Semester 1 Tahun 2025

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antaralain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lampulo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 01 Juli 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo,

Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 26

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 48

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 75

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 87

F. Pengungkapan Penting Lainnya 91

Lampiran dan Daftar 98

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
Jalan Indra Budiman No. 12 Lampulo Banda Aceh
Telepon 0651 6303980, Faximile 0651 6303980

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 T.A 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 01 Juli 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo,

Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi.

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara s.d. 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.500.000. Realisasi Belanja Negara yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 8.977.622.983. atau mencapai 25,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35.009.622.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 24.149.034.661, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 617.171.735. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 23.531.862.926 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 750.760.783 dan Ekuitas sebesar Rp. 23.398.273.878.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.

13.384.707.077, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 13.384.707.077). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Sebelum POS Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 dan sebesar (Rp. 13.384.707.077), sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar (Rp. 13.384.707.077).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 25.969.887.937. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (13.383.207.077) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (1.485.000) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 10.813.078.018. Terdapat penurunan ekuitas (Rp. 2.571.614.059) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 23.398.273.878.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2025		% thd Angg	TA. 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.500.000		-	2.650.000
JUMLAH PENDAPATAN		**1.500.000,00**		**-**	**2.650.000**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	8.499.112.000	4.792.016.544		4.668.061.732
Belanja Barang	B.4	24.219.517.000	4.166.415.439		7.036.398.172
Belanja Modal	B.5	2.290.993.000	19.191.000		1.194.352.100
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		**35.009.622.000**	**8.977.622.983**	**25,64**	**12.898.812.004**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		6.666.667
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	317.171.735	213.895.710
Jumlah Aset Lancar		617.171.735	220.562.377
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	6.263.317.551	6.263.317.551
Peralatan dan Mesin	C.15	74.190.417.364	46.350.966.244
Gedung dan Bangunan	C.16	15.242.325.758	15.243.825.758
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	2.100.578.762	2.100.578.762
Aset Tetap Lainnya	C.18		-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	10.000.000	10.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(74.274.776.509)	(44.186.174.056)
Jumlah Aset Tetap		23.531.862.926	25.782.514.259
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**24.149.034.661**	**26.003.076.636**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	300.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	428.223.831	33.188.699
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		-
Hibah yang belum disahkan		-	-
Utang belum ditagihkan		22.536.952	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		750.760.783	33.188.699
JUMLAH KEWAJIBAN		750.760.783	33.188.699
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	23.398.273.878	25.969.887.937
JUMLAH EKUITAS		23.398.273.878	25.969.887.937
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**24.149.034.661**	**26.003.076.636**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.081.477.375	4.963.867.238
Beban Persediaan	D.3	1.901.000	60.374.985
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.805.356.152	4.434.446.431
Beban Pemeliharaan	D.5	640.670.891	872.057.630
Beban Perjalanan Dinas	D.6	300.016.955	1.782.434.528
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.555.284.704	2.633.426.303
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10		-
JUMLAH BEBAN		**13.384.707.077**	**14.746.607.115**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(13.384.707.077)**	**(14.746.607.115)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	(384.157.835)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.500.000	(384.157.835)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(13.386.207.077)**	**(15.130.764.950)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(13.386.207.077)**	**(15.130.764.950)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**E.1**	**25.969.887.937**	**24.065.064.343**
SURPLUS/DEFISIT LO	**E.2**	**(13.383.207.077)**	**(15.130.764.950)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**E.3**	**(1.485.000)**	**(2.811.998)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**E.3.1**	**-**	**-**
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(2.825.248)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	13.250
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.813.078.018	12.896.162.004
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.571.614.059)	(2.237.414.944)
EKUITAS AKHIR	**E.5**	**23.398.273.878**	**21.827.649.399**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2024 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Visi KKP adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi KKP

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Indra Budiman No. 12 Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan Pengawasan SDKP Lampulo mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572 dengan 5 Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP yaitu: Satwas Aceh Barat, Satwas Simeulu, Satwas Padang, Satwas Sibolga dan Satwas Bengkulu.

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2025-2029 yaitu "Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan **Misi** Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tata tertib peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Lampulo telah menetapkan 9 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: (1) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (2) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (3) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; (5) Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; (6) Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; (7) Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; (8) Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; (9) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Lampulo beserta dengan satuan pengawasan (satwas) dan wilayah kerja (wilker) sampai dengan 30 Juni 2025 memiliki jumlah pegawai sebanyak 105 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS/ASN	PPPK	PPNPN	PJLP
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	25	10	13	14
2	Satwas SDKP Aceh Barat	3	-	3	-
3	Satwas SDKP Simeulue	2	1	1	1
4	Satwas SDKP Sibolga	5	1	2	-
5	Satwas SDKP Padang	4	2	1	2
6	Satwas SDKP Bengkulu	3	1	-	-
7	KP. Hiu 12	9	2	-	-
Jumlah		**51**	**20**	**17**	**17**

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: Gedung Kantor, Mess, Gedung Kantor Satwas, Kapal Pengawas Hiu 12, Kapal Pengawas Hiu Macan 05, Speedboat dan RIB.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar

nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

bb

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	✓ Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	0%
	✓ Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan Suku Cadang Kapal
  1) Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap

dicatat sebagai persediaan;

2) KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada dikapal.
3) Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau dibawah dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari dari Rp.

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan lrigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek

penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjangjika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada semester 1 Tahun Anggaran 2025, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA-032.05.2.065135/2025. Hingga 30 Juni 2025 dan Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak **10 (sepuluh)** kali dengan rincian sebagai berikut:

1. **Revisi Pertama** pada tanggal 13 Januari 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai dengan Surat Usulan Revisi: B.60/PSDKPLan.1/KU-510/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025.

   Rincian pada revisi kali ini adalah Pengeseran belanja gaji/honor/jasa PJLP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025 yang berdasarkan nota dinas sekretaris Jenderal KKP Nomor: 1428/SJ/KP.320/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal penggajian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Lingkup.

   pergeseran anggaran dalam 1 RO untuk jenis belanja yang sama yaitu Kebutuhan sehari-hari (002/A/521111) sebesar Rp. 439.569.000 ke Kebutuhan sehari-hari (002/A/522191) sebesar Rp. 439.569.000.

2. **Revisi Kedua** pada tanggal 06 Februari 2025 berupa permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai dengan Surat Usulan Revisi: B.308/PSDKPLan.1/RC.420/II/2025 Tanggal 06

Februari 2025. Rincian pada revisi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Revisi pada KRO 2351.AEA.002.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp.2.800.000 dan pengurangan pada KRO 2351.AEA.002.052.A.524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp. 15.800.000 menjadi sebesar Rp. 13.000.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan operasional rapat koordinasi TPKP di daerah dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
2. Revisi pengurangan dilakukan pada KRO 2352.QIC.002.052.H.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) dari nilai Rp. 45.760.000 menjadi Rp. 10.486.000. Lalu penambahan pada KRO 2352.QIC.002.052.H.524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) senilai Rp. 35.274.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini dialokasikan untuk penambahan belanja perjalanan dinas kegiatan pengawasan usaha perikanan berbasis risiko dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan.
3. Revisi pada KRO 2355.EBA.956.052.C.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp.6.690.000 dan pengurangan pada KRO

2355.EBA.956.052.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp. 16.644.000 menjadi sebesar Rp. 9.954.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Pemindahtanganan BMN Lingkup Ditjen PSDKP dan meningkatkan layanan BMN.

4. Revisi pada KRO 2355.EBD.955.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp.36.267.000 dan pengurangan pada KRO 2355.EBD.955.052.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp. 68.976.000 menjadi sebesar Rp. 32.709.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo dan meningkatkan layanan manajemen keuangan.
5. Revisi pada KRO 2355.EBD.961.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp.2.640.000 dan pengurangan pada KRO 2355.EBD.961.052.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp. 16.160.000 menjadi sebesar Rp. 13.520.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP dan meningkatkan Layanan Reformasi Kinerja.

3. **Revisi Ketiga** pada tanggal 21 Februari 2025 dengan tema revisi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025. Rincian pada revisi kali sbb:

   Pagu yang diblokir:

   1. 2350 Operasi Armada serta Pembangunan Prasarana dan Sarana PSDKP meliputi:
      a. Semula
         Pagu Rp. 17.855.548.000;
         Blokir Rp. 6.913.519.000;
      b. Menjadi
         Pagu Rp. 17.855.548.000;
         Blokir Rp. 13.540.578.000;

      Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 6.627.059.000.
   2. 2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan meliputi:
      a. Semula
         Pagu Rp. 256.615.000;
         Blokir Rp. 88.117.000;
      b. Menjadi
         Pagu Rp. 256.615.000;
         Blokir Rp. 207.230.000;

      Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 119.113.000.
   3. 2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:
      a. Semula
         Pagu Rp. 1.086.956.000;
         Blokir Rp. 571.285.000;
      b. Menjadi

Pagu Rp. 1.086.956.000;

Blokir Rp. 948.503.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 377.218.000

4. 2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan meliputi:
   a. Semula

      Pagu Rp. 300.000.000;

      Blokir Rp. 94.332.000;

   b. Menjadi

      Pagu Rp. 300.000.000;

      Blokir Rp. 300.000.000;

   Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 205.668.000
5. 2355.Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:
   a. Semula

      Pagu Rp. 4.975.102.000;

      Blokir Rp. 752.027.000;

   b. Menjadi

      Pagu Rp. 4.975.102.000;

      Blokir Rp. 3.621.917.000;

   Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 2.869.890.000

Adapun sumber anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP dengan komposisi seperti berikut:

1. Rupiah Murni
   - Semula
      a. Pagu Rp. 28.606.804.000
      b. Blokir Kode 2 Rp. 496.667.000
      c. Blokir Kode A Rp. 2.016.462
      d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp. 2.513.129.000

- Menjadi
  a. Pagu Rp. 28.606.804.000
  b. Blokir Kode 2 Rp. –
  c. Blokir Kode A Rp. 12.712.077.000
  d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp. 12.712.077.000

2. PNBP
   - Semula
     a. Pagu Rp. 6.402.818.000
     b. Blokir Kode 2 Rp. 6.402.818.000
     c. Blokir Kode A Rp. –
     d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp. 6.402.818.000
   - Menjadi
     a. Pagu Rp. 6.402.818.000
     b. Blokir Kode 2 Rp. 2.520.756.000
     c. Blokir Kode A Rp. 3.882.062.000
     d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp. 6.402.818.000

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 kami mengusulkan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Berkaitan hal tersebut, kami sampaikan justifikasi revisi sebagai berikut:

1. Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)

   Tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan

nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, nilai efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 2.120.355.524.000 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 1.742.804.989.000 dan Belanja Modal Rp. 377.550.535.000 dari Pagu KKP sebesar Rp. 6.220.563.824.000. Ditjen PSDKP mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 398.458.464.000 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 380.070.553.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 18.387.911.000. Pasca efisiensi anggaran, Pagu efektif

2. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker yang melakukan revisi anggaran.

4. **Revisi Keempat** pada tanggal pada tanggal 28 Februari 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B. B.426.PSDKPLan.1/RC.420.II/2025 Tanggal 27 Februari 2025.

   Rincian pada revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

   1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas
      - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp. 488.050.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan

Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 488.050.000.

2. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran
   - Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Layanan Daya dan Jasa (022/A, dan B) Akun 52 sebesar Rp. 8.390.000 dan Rp. 32.400.000 menjadi Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) (022/C Akun 52 sebesar Rp. 40.790.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan Gedung Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo.

5. Revisi Kelima pada tanggal 15 Maret 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.528/PSDKPLan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 12 Maret 2025.

Rincian pada revisi kelima berupa pergeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
   - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp. 286.859.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 286.859.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Delegasi KP HIU 12 dan KP Macan 05, Kebutuhan

sehari-hari Kapal Pengawas, Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Kapal Pengawas, Nataru, dan Uang Jaga Sandar Kapal Pengawas.

6. **Revisi Keenam** pada tanggal 24 Maret 2025 dengan tema revisi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.243/DJPSDKP/RC.420/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025.

   Rincian pada revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

   a. 2352.999 Cadangan

      Cadangan (999/A sampai dengan K) sebesar Rp. 496.667.000 menjadi 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp. 496.667.000.

   Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

   1) Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan; (ii)Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana;
   2) Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan yang merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya izin pelampauan SBK TA 2025 lingkup KKP melalui Surat Izin Pelampauan SBK dari Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Izin Pelampauan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran

2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3) Pencantuman/Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) pada pergeseran anggaran dari RO Cadangan ke RO yang telah mendapatkan izin pelampauan SBK TA 2025; dan
4) Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.

7. Revisi Ketujuh pada tanggal 14 April 2025 dengan tema revisi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025, dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.251/PSDKPLan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 25 Maret 2025.

Rincian pada revisi kali ini sbb :

Pagu yang diblokir:

1. Program HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan meliputi:
   a. Semula
      Pagu Rp. 8.546.388.000;
      Blokir Rp. 4.878.781.000;
   b. Menjadi
      Pagu Rp. 8.546.388.000;
      Blokir Rp. 409.252.000;

   Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 4.469.205.000.
2. Program WA Program Dukungan Manajemen meliputi:
   a. Semula
      Pagu Rp. 389.400.000;
      Blokir Rp. 229.440.000;

b. Menjadi

Pagu Rp. 389.400.000;

Blokir Rp. 58.764.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp. 170.676.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

1) Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana;
2) Usul revisi anggaran Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) yang berupa buka blokir kode-A pada kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002); dan
3) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.

8. Revisi Ke Delapan pada tanggal pada tanggal 09 Mei 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.797/PSDKPLan.1/RC.420/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025.

Rincian pada revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas:
   - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) sebesar Rp. 126.000.000 dan Penyediaan Logistik Awak Kapal

Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 602.897.000 ke Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) sebesar Rp. 677.597.000 dan penambahan sub komponen baru yaitu Dukungan operasional kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/ Lembaga (052/F sebesar Rp. 51.300.000.

2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat:
   - Perawatan Darurat Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 150.124.000, Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/D) Akun 52 sebesar Rp. 8.400.000 dan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/E) Akun 52 sebesar Rp. 108.500.000 ke Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp. 282.000.000 dan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas (052/B) Akun 52 sebesar Rp. 55.752.000.
3. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya:
   - Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (052/A) Akun 52 sebesar Rp.3,075,000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha Pemanfaatan Ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (052/B) Akun 52 sebesar Rp.1,517,000, Pelaksanaan

pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya (052/C) Akun 52 sebesar Rp.4,500,000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/D) Akun 52 sebesar Rp.4,510,000, dan Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang diperiksa kepatuhannya (052/E) Akun 52 sebesar Rp.7,500, 000 ke sub kompnen baru yaitu Pengawasan SDK (052/G) Akun 52 sebesar Rp.21,102,000.

4. 2355.EBA.956 Layanan BMN:
   - Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524119 sebesar Rp.750,000 ke Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524113 sebesar Rp.750,000
5. 2355.EBA.962 Layanan Umum:
   - TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524111 sebesar Rp. 1.500.000 ke TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524113 sebesar Rp. 1.500.000.
6. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran:
   - Tunjangan Kinerja PPPK (001/D) Akun 51 sebesar Rp. 3.714.000 ke Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp. 224.000. Tunjangan Kinerja PNS (001/B) Akun 51 sebesar Rp.

2.980.000 dan Pembayaran Gaji PPPK (001/C) Akun 51 sebesar Rp. 510.000.

- Layanan Daya dan Jasa (002/B) Akun 52 sebesar Rp. 30.040.000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran (002/A) Akun 52 sebesar Rp. 22.700.000 dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) (002/C) Akun 52 sebesar Rp. 7.340.000.

7. 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal:
   - Layanan Reformasi Kinerja (2355.EBD.961/ 052/A) Akun 52 sebesar Rp. 40.000 ke Layanan Manajemen Keuangan (2355.EBD.955/052/A) Akun 52 sebesar Rp. 40.000.

   Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

   1) Penambahan sub komponen dalam rangka kegiatan kunjungan DPR RI Komisi IV ke Kota Sabang;
   2) Pergeseran bertujuan untuk pemenuhan kegiatan perbaikan KP HIU 12 berupa pergantian plat body kapal yang mengalami kebocoran dan perbaikan lainnya guna stabil Kembali pengoperasional KP HIU 12;
   3) Pergeseran bertujuan untuk memastikan kegiatan pengawasan SDK berjalan akibat dari penghematan anggaran serta terbatas;
   4) Pergeseran bertujuan untuk mengakomodir kegiatan dalam kota berupa transportasi lokal;
   5) Pergeseran bertujuan untuk menambah anggaran transportasi lokal dalam pelaksanaan tugas administrasi pada layanan umum;

6) Pergeseran bertujuan untuk mengatasi pagu minum pada belanja pegawai;
7) Pergeseran bertujuan untuk optimalisasi anggaran.

9. Revisi Ke Sembilan pada tanggal 23 Mei 2025 dengan tema revisi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025.

Rincian pada revisi kali ini sbb:

Buka blokir PNBP antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
   - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A).
     a) Blokir sebesar Rp.3,639,063,000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp. 3.639.063.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP).
   - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/PNBP (052/E).
     a) Blokir sebesar Rp. 2.520.756.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp. 2.520.756.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu

12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP).

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Buka Blokir kode 2 pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas sumber dana PNBP sebesar Rp. 6.402.818.000 , Kementerian Keuangan telah menyetujui penggunaan PNBP pemanfaatan SDA Perikanan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-328/MK.02/2025 Tanggal 11 Mei 2025 perihal persetujuan Penggunaan Dana PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2025 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

10. **Revisi Ke Sepuluh** pada tanggal 17 Juni 2025 dengan tema revisi Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.929/PSDKPLan.1/RC.420/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025.

Rincian pada revisi ke-sepuluh berupa pergeseran antar jenis belanja antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
   - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 52 sebesar Rp. 392.000.000. ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 53 sebesar Rp. 392.000.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah

Pergeseran antar jenis belanja yang semula 52 (Belanja Barang) menjadi 53 (belanja modal) bertujuan untuk pemenuhan Listrik Darat Kapal Pengawas pada 2 (dua) Lokasi yaitu Padang dan Sibolga sebesar Rp. 392.000.000. Pembagunan atau pemasangan baru Listrik merupakan Langkah dalam penghematan biaya operasional Kapal Pengawas berupa penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan terdistribusinya Listrik ke kapal, kapal dapat mengurangi emisi dan biaya BBM sendiri.

- **Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pangkalan PSDKP Lampulo terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
  2. Pelaksanaannya di antaranya melalui 5 program prioritas, yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo dengan pagu Rp. 15.818.525.000 dan realisasi sebesar Rp. 5.983.583.908 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QHD	**Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam**	**13.967.369.000**	**5.815.249.128**	**41,63**					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	13.669.898.000	5.726.666.628	41,89	Operasi	12	2	16,67	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	297.471.000	88.582.500	29,78	Operasi	10	2	20,00	
2350.RCG	**OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**1.419.948.000**	**112.195.000**	**7,90**					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan Yang Dirawat	1.419.948.000	112.195.000	7,90	Unit	6	3	50,00	
2352.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**	**131.208.000**	**56.139.780**	**42,79**					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	32.955.000	14.261.700	43,28	Lembaga	25	10	40,00	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	98.253.000	41.878.080	42,62	Lembaga	68	30	44,12	
2353.QDD	**Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**300.000.000**	-	-					
2353.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	300.000.000	-	-	Kelompok Masyarakat	3	0	100,00	
TOTAL		**15.818.525.000**	**5.983.583.908**	**92**					

3. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

4. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang terdapat di Pangkalan PSDKP Lampulo dengan pagu mencapai Rp 1.550.000.000. realisasi sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%
2350.RBQ	**Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan**	**1.550.000.000**	**-**	**-**				
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP Yang Dibangun	1.550.000.000	-	-	Unit	1	0	-
TOTAL		**1.550.000.000**	**-**	**-**				

Realisasi Pendapatan Rp 1.500.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.500.000 dari pendapatan yang ditetapkan yaitu Rp.0

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913) senilai 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan yang Berakhir 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913)	-	1.500.000	
Jumlah	**-**	**1.500.000**	**-**

Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp. 1.500.000 dirincikan sebagai berikut:

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) adalah kelebihan pembayaran atas item biaya listrik pada kontrak pembangunan kantor Satwas SDKP Padang. Pengembalian sudah dibayarkan ke kas negara dengan NTB: 903131084807 dan NTPN: AE69948VVNO4TK78 tanggal 23 Januari 2025.

Perbandingan Pendapatan Tanggal 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK/TURUN (%)
PNBP	1.500.000	2.650.000	(43,40)
Jumlah	**1.500.000**	**2.650.000**	**-**

Realisasi PNBP yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

Realisasi Belanja Negara Rp. 8.977.622.983

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pangkalan PSDKP Lampulo 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 8.977.622.983 atau mencapai 25,64% dari anggaran belanja sebesar Rp 35.009.622.000. Belanja terdiri atas belanja pegawai (51), belanja barang (52), dan belanja modal (53). Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.499.112.000,	4.792.016.544	56,38
Belanja Barang	24.219.517.000,	4.166.415.439	17,20
Belanja Modal	2.290.993.000,	19.191.000	0,84
Total Belanja Kotor	**35.009.622.000**	**8.977.622.983**	**25,64**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	**35.009.622.000**	**8.977.622.983**	**25,64**

Anggaran Belanja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 35.009.622.000 dengan realisasi 30 Juni 2025 sebesar 8.977.662.983 atau sebesar 25,64%.

Belanja pegawai telah terserap sebesar 56,38 % dengan nilai serapan Rp. 4.792.016.544 dari Pagu Rp. 8.499.112.000. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp. 4.166.415.439 atau sekitar 17,20% dari pagu anggaran Rp. 24.219.517.000 Selanjutnya, belanja modal telah terserap sebesar Rp. 19.191.000 atau 0,84% dari anggaran Rp. 2.290.993.000.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.792.016.544	4.668.061.732	2,66
Belanja Barang	4.166.415.439	7.036.398.172	(40,79)
Belanja Modal	19.191.000	1.194.352.100	(98,39)
Jumlah	**8.977.622.983**	**12.898.812.004**	**(30,40)**

Realisasi belanja periode Semester 1 TA 2025 mengalami penurunan sebesar 30,40% jika dibandingkan dengan TA 2024. Penurunan ini terjadi di hampir semua jenis belanja, kecuali belanja pegawai yang justru mengalami peningkatan. Rendahnya realisasi belanja periode ini dipengaruhi juga oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 114/SJ/RC.420/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Belanja Pegawai
Rp.4.792.016.544

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan yang terdiri atas: gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan uang lembur pegawai kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian belanja pegawai yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS(5111)	**3.285.174.000**	**1.884.815.903**	**57,37**
Belanja Gaji Pokok PNS	2.491.450.000	1.417.150.000	56,88
Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.000	19.156	45,61
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	187.388.000	107.468.040	57,35
Belanja Tunj. Anak PNS	66.332.000	38.760.848	58,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	31.680.000	15.480.000	48,86
Belanja Tunj. Fungsional PNS	69.730.000	40.280.000	57,77
Belanja Tunj. PPh PNS	13.216.000	12.944.071	97,94
Belanja Tunj. Beras PNS	133.836.000	88.714.500	66,29
Belanja Uang Makan PNS	216.000.000	119.102.000	55,14
Belanja Tunjangan Umum PNS	75.500.000	44.965.000	59,56
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	-67.712	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	**1.056.658.000**	**611.906.798**	**57,91**
Belanja Gaji Pokok PPPK	808.416.000	461.947.200	57,14
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.000	9.110	32,54
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	58.148.000	34.976.000	60,15
Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.650.000	11.795.888	57,12
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.140.000	40.080.000	57,14
Belanja Tunjangan Beras PPPK	51.276.000	34.761.600	67,79
Belanja Uang Makan PPPK	48.000.000	28.337.000	59,04
Belanja Lembur (5122)	**86.136.000**	**21.853.000**	**25,37**
Belanja Lembur PNS	71.544.000	16.306.000	22,79
Belanja Uang Lembur PPPK	14.592.000	5.547.000	38,01
Belanja Tunj. Khusus (5124)	**4.071.144.000**	**2.273.440.843**	**55,84**
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.017.256.000	1.742.341.530	57,75
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.053.888.000	531.099.313	50,39
Jumlah Belanja	**8.499.112.000**	**4.792.016.544**	**56,38**

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	**1.884.815.903**	**1.880.696.124**	0,22
Belanja Gaji Pokok PNS	1.417.150.000	1.440.515.000	(1,62)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.156	22.677	(15,53)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107.468.040	105.136.130	2,22
Belanja Tunj. Anak PNS	38.760.848	37.768.376	2,63
Belanja Tunj. Struktural PNS	15.480.000	18.720.000	(17,31)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	40.280.000	34.480.000	16,82
Belanja Tunj. PPh PNS	12.876.359	12.367.181	4
Belanja Tunj. Beras PNS	88.714.500	88.931.760	(0,24)
Belanja Uang Makan PNS	119.102.000	94.195.000	26,44
Belanja Tunjangan Umum PNS	44.965.000	48.560.000	(7,40)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	**611.906.798**	**592.352.839**	3,30
Belanja Gaji Pokok PPPK	461.947.200	453.639.200	1,83
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.110	10.479	(13,06)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34.976.000	32.199.360	8,62
Belanja Tunjangan Anak PPPK	11.795.888	11.507.920	2,50
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	40.080.000	39.540.000	1,37
Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.761.600	33.602.880	3,45
Belanja Uang Makan PPPK	28.337.000	21.853.000	29,67
Belanja Lembur (5122)	**21.853.000**	**85.312.000**	(74,38)
Belanja Lembur PNS	16.306.000	71.303.000	(77,13)
Belanja Uang Lembur PPPK	5.547.000	14.009.000	-
Belanja Tunj. Khusus (5124)	**2.273.440.843**	**2.109.700.769**	7,76
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.742.341.530	1.591.070.329	9,51
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	531.099.313	518.630.440	2,40
Jumlah Belanja	**4.792.016.544**	**4.668.061.732**	**2,66**

Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 meningkat tidak signifikan yaitu sebesar 2,66%. Kenaikan ini disebabkan oleh komponen belanja rutin yang bersifat tetap dan tidak dapat dieliminasi, seperti gaji, tunjangan, dan THR serta kenaikan belanja tunjangan khusus (5124) belanja pegawai kegiatan/ kinerja.

Belanja barang turun drastis sebesar 40,79%, dari Rp. 7.036.398.172 (2024) menjadi Rp. 4.166.415.439. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi belanja barang berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang mengintruksikan agar memotong belanja barang bersifat konsumtif (ATK 90%, seremonial 56%, rapat/seminar 45%, percetakan/souvenir 75%, sewa gedung/kendaraan/peralatan 73,3%, dan belanja lainnya 59%) dan perjalanan dinas (53%) dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas.

Belanja modal turun sangat signifikan sebesar 98,39%, dari Rp. 1.194.352.100 (2024) menjadi hanya Rp. 19.191.000. Ini menandakan tidak adanya alokasi signifikan untuk pembangunan fisik atau pengadaan aset baru.

Belanja Barang

Rp 4.166.415.439

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.166.415.439 dan Rp. 7.036.398.172. Realisasi Belanja Barang yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 mencapai 17,2 % dari anggaran sebesar Rp 24.219.517.000. Belanja barang terdiri atas belanja operasional, non operasional, persediaan, pemeliharaan, jasa, perjalanan dalam negeri. Rincian belanja barang disajikan pada tabel berikut:

No	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%Realisasi
1	**Belanja Barang Operasional (5211)**	**1.932.907.000**	**575.775.579**	**29,79**
	Belanja Keperluan Perkantoran	1.236.345.000	472.093.179	38,18
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	266.902.000	57.954.400	21,71
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.300.000	838.000	4,58
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138.560.000	44.890.000	32,40
	Belanja Barang Operasional Lainnya	272.800.000	0	-
2	**Belanja Barang Non Operasional (5212)**	**13.874.473.000**	**2.466.137.116**	**17,77**
	Belanja Bahan	12.904.965.000	2.343.273.600	18,16
	Belanja Honor Output Kegiatan	13.730.000	0	-
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	955.778.000	122.863.516	12,85
3	**Belanja Barang Persediaan (5218)**	**138.000.000**	**8.585.500**	**6,22**
	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	138.000.000	8.585.500	6,22
4	**Belanja Jasa (5221)**	**2.254.030.000**	**644.997.649**	**28,62**
	Belanja Langganan Listrik	379.860.000	124.558.265	32,79
	Belanja Langganan Telepon	164.400.000	76.634.161	46,61
	Belanja Langganan Air	18.000.000	2.597.523	14,43
	Belanja Sewa	245.440.000	15.000.000	6,11
	Belanja Jasa Profesi	61.700.000	0	-
	Belanja Jasa Lainnya	1.384.630.000	426.207.700	30,78
5	**Belanja Pemeliharaan (5231)**	**2.641.341.000**	**184.075.640**	**6,97**
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	557.235.000	7.000.000	1,26
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.308.354.000	170.275.640	13,01
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	775.752.000	6.800.000	0,88
6	**Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)**	**3.378.766.000**	**286.843.955**	**8,49**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.730.590.000	251.981.072	9,23
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	190.720.000	3.519.000	1,85
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.500.000	0	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	424.956.000	31.343.883	7,38
	Jumlah Belanja	**24.219.517.000**	**4.166.415.439**	**17,20**

Belanja barang terbesar Pangkalan PSDKP Lampulo yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 adalah Belanja Barang Non Operasional, belanja tersebut berupa belanja bahan (521211) dan yang terdiri dari belanja BBM kapal pengawas KP. Hiu 012 dan Speedboat, belanja pelumas dan air bersih. Adapun rincian belanja berdasarkan item transaksinya dapat dilihat di bawah ini:

Akun	Item Belanja	Jumlah
521111	**Belanja Keperluan Perkantoran**	**472.093.179**
	Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas	***11.699.500***
	Jamuan Tamu di Kapal Pengawas	6.290.000
	Kebutuhan sehari-hari KP HIU 12	5.246.500
	Kebutuhan sehari-hari KP HIU MACAN 5	163.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	***460.393.679***
	THR Pramubakti	63.869.000
	Penghasilan PPNPN Lingkup Pangkalan PSDKP	319.345.000
	Pangkalan PSDKP Lampulo (JDT)	20.050.950
	Satwas SDKP Padang (JDT)	8.100.000
	Satwas SDKP Bengkulu (JDT)	5.299.000
	Pangkalan PSDKP Lampulo (KKSS)	30.786.900
	Uang Lembur Pramubakti	3.042.000
	Uang Makan Pramubakti	1.530.000
	Satwas SDKP Aceh Barat (KKSS)	1.201.000
	Satwas SDKP Sibolga,dan Wilker (KKSS)	173.000
	Satwas SDKP Padang,dan Wilker (KKSS)	4.359.000
	Satwas SDKP Bengkulu (KKSS)	1.016.129
	KP HIU 12 dan KP MACAN 05 (KKSS)	1.500.000
	Pajak Kendaraan Roda 2	121.700

Realisasi anggaran untuk akun 521111 – Belanja Keperluan Perkantoran hingga saat ini mencapai total Rp. 472.093.179. Anggaran tersebut terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp11.699.500 dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp.460.393.679. Pengeluaran terbesar terdapat pada operasional dan pemeliharaan kantor, khususnya untuk pembayaran penghasilan PPNPN dan kebutuhan operasional satuan kerja.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521113	**Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh**	**57.954.400**
	Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh KP. HIU 12	18.598.000
	Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh KP. HIU MACAN 05	34.619.000
	PSDKP Lampulo	3.190.000
	Satwas SDKP Simeulu + Wilker	630.000
	Satwas SDKP Aceh Barat	228.000
	Satwas SDKP Bengkulu	575.400
	Wilker Sabang	114.000

Total realisasi anggaran untuk Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh mencapai Rp. 57.984.400. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kesehatan dan ketahanan fisik personel, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.

Penggunaan terbesar berasal dari biaya makanan penambah daya tahan tubuh pada KP. HIU MACAN 05 sebesar Rp. 34.617.000, diikuti oleh KP. HIU 12 sebesar Rp.16.586.000.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521114	**Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat**	**838.000**
	PSDKP Lampulo+Wilker Sabang	216.000
	Satwas SDKP Aceh Barat	120.000
	Satwas SDKP Sibolga+Wilker	67.000
	Satwas SDKP Padang+Wilker	225.000
	Satwas SDKP Bengkulu	210.000

Realisasi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pada akun 521114 dengan total anggaran sebesar Rp. 838.000. Pengeluaran ini tersebar di beberapa satuan kerja lingkup PSDKP.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521115	**Belanja Honor Operasional Satuan Kerja**	**44.890.000**
	Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	600.000
	Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	600.000
	Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	450.000
	Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	1.350.000
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	9.500.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15.040.000
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan Spm	4.600.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	4.000.000
	Honorarium Staf Pengelola/Staf PPK	5.900.000
	Honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	1.950.000
	Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	900.000

Realisasi Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dengan total anggaran sebesar Rp. 48.890.000 dialokasikan untuk

pembayaran honorarium kepada berbagai pejabat dan petugas yang terlibat dalam operasional dan pengelolaan satuan kerja sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dan kontribusi personel dalam menjalankan fungsi administrasi, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara secara tertib dan akuntabel.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521211	**Belanja Bahan**	**2.343.273.600**
	Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12_Air Bersih (Buka Blokir)	10.260.000
	Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12_Air Bersih	30.960.000
	Bahan Bakar Minyak Stasioner	1.974.725.000
	Pelumas Stasioner	82.251.000
	Pelaporan Hasil Gelar Operasi (Buka Blokir)	234.000
	Belanja Bahan Makanan AKP KP. HIU 12 (NATURA)	64.950.000
	Belanja Bahan Makanan AKP KP. HIU MACAN 05 (NATURA)	111.486.100
	Pelumas Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	2.886.000
	BBM Operasi Speed Boat 8 Meter	26.625.000
	Pelumas Speed Boat 8 Meter	1.600.000
	BBM Operasi Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	27.323.500
	Pelumas Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	270.000
	Konsumsi Rapat dalam Rangka Perencanaan Operasi Speedboat	2.800.000
	Biaya makan dan Snack rapat persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	750.000
	Biaya makan rapat persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	1.500.000
	Konsumsi Rapat Monev Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	750.000
	Konsumsi Rapat dalam rangka penyusunan rencana pengawasan (Aceh)	450.000
	Layanan Umum Rumah Tangga Konsumsi Makan dan Snack (Aceh)	3.453.000

Realisasi anggaran belanja bahan periode ini mencapai Rp. 2.343.273.600. Pengeluaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional kapal pengawas, kegiatan pengawasan, konsumsi rapat, hingga keperluan rumah tangga dinas.

Anggaran ini secara umum digunakan untuk mendukung kelancaran operasional kapal pengawas dan kegiatan

pengawasan, termasuk logistik kapal, konsumsi awak kapal, serta sarana pendukung kegiatan administrasi dan monitoring di lapangan.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521219	**Belanja Barang Non Operasional Lainnya**	**122.863.516**
	Biaya Delegasi Kp. Hiu 12	15.470.000
	Uang Jaga Sandar KP. Hiu 12	28.351.600
	Uang Jaga Sandar KP. Hiu Macan 05	44.037.500
	Uang Makan Operasional Speed Boat 12 Meter	1.450.000
	Biaya Delegasi Operasional Speed Boat 12 Meter	6.760.000
	Uang Makan Operasional Speed Boat 8 Meter	2.845.000
	Biaya Delegasi Operasional Speed Boat 8 Meter	12.895.000
	Biaya Delegasi Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	2.552.000
	Uang Makan Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	576.000
	Lisensi Zoom	2.100.000
	G Driver/Google One	859.095
	Microsoft Office	4.967.321

Realisasi anggaran untuk akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya dengan total anggaran sebesar Rp. 122.863.516. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kebutuhan non-operasional dalam kegiatan pengawasan dan administrasi Pangkalan PSDKP, khususnya terkait dukungan teknis dan logistik lapangan.

Beberapa komponen pengeluaran utama meliputi, biaya delegasi dan uang jaga untuk kapal pengawas Hiu 12 dan KP. Hiu Macan 05 senilai Rp. 87.859.100, biaya operasional dan konsumsi untuk speedboat 12 dan 8 meter serta speedboat Baramundi 01 senilai Rp. 27.078.000, belanja langganan aplikasi dan perangkat lunak sebesar Rp. 7.926.416.

Akun	Item Belanja	Jumlah
521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**8.585.500**
	ATK Kapal Pengawas HIU 12	1.146.000
	ATK PSDKP Lampulo+Wilker	2.410.500
	ATK Satwas SDKP Simeulu + Wilker	500.000
	ATK Satwas SDKP Aceh Barat	89.000
	ATK Satwas SDKP Padang	500.000
	ATK Satwas SDKP Bengkulu	500.000
	Computer supply PSDKP Lampulo dan Wiker	1.940.000
	Computer supply Satwas SDKP Simeulu + Wilker	500.000
	Computer supply Satwas SDKP Bengkulu	500.000
	Computer supply Satwas SDKP Padang	500.000

Realisasi anggaran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi pada akun 521811 dengan total anggaran sebesar Rp. 8.585.500. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan komputer (computer supply) guna mendukung operasional administrasi dan pengawasan di berbagai satuan kerja (Satker) lingkup PSDKP.

Akun	Item Belanja	Jumlah
522111	**Belanja Langganan Listrik**	**124.558.265**
	Biaya Langganan Listrik Kapal Darat	1.287.540
	Lingkup PSDKP Lampulo	123.270.725
	PSDKP Lampulo+Wilker Sabang	82.361.400
	Satwas SDKP Simeulu + Wilker	7.744.096
	Satwas SDKP Aceh Barat	3.018.598
	Satwas SDKP Sibolga+Wilker	7.490.712
	Satwas SDKP Padang+Wilker	13.599.323
	Satwas SDKP Bengkulu	9.056.596

Realisasi anggaran belanja langganan listrik periode semester satu mencapai nilai Rp. 124.558.265. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan listrik di seluruh satuan kerja lingkup PSDKP Lampulo, baik untuk kantor darat maupun kapal darat yang beroperasi secara rutin upaya menjaga kelancaran operasional dan pelayanan pengawasan perikanan di masing-masing wilayah kerja.

Akun	Item Belanja	Jumlah
522112	**Belanja Langganan Telepon**	**76.634.161**
	PSDKP Lampulo+Wilker Sabang	35.042.795
	Satwas SDKP Simeulu + Wilker	4.477.871
	Satwas SDKP Aceh Barat	9.298.714
	Satwas SDKP Sibolga+Wilker	9.588.062
	Satwas SDKP Padang+Wilker	10.901.069
	Satwas SDKP Bengkulu	7.325.650

Realisasi anggaran belanja langganan telepon sebesar Rp. 76.634.161 ini mencerminkan upaya optimalisasi sistem komunikasi yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan, pelaporan, dan respon cepat terhadap isu kelautan dan perikanan di seluruh wilayah kerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dan internal organisasi.

Akun	Item Belanja	Jumlah
522113	**Belanja Langganan Air**	**2.597.523**
	Satwas SDKP Aceh Barat	500.000
	Wilker Sabang	333.000
	Satwas SDKP Sibolga+Wilker	397.123
	Satwas SDKP Padang+Wilker	1.367.400

Realisasi anggaran belanja langganan air mencapai Rp. 2.597.523, atau 15,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana untuk belanja air masih berada pada tahap awal, dengan realisasi yang relatif rendah di pertengahan tahun.

Akun	Item Belanja	Jumlah
522141	**Belanja Sewa**	**15.000.000**
	Sewa Gedung Pelayanan Satwas Aceh Barat	15.000.000

Realisasi belanja sewa sebesar Rp. 15.000.000,- berupa pembayaran sewa gedung pelayanan Satwas Aceh Barat sesuai Surat Perjanjian Sewa nomor 0067/PSDKPLan.1/PL.421/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Akun	Item Belanja	Jumlah
522191	**Belanja Jasa Lainnya**	**426.207.700**
	Ongkos Angkut BBM Stasioner	11.460.000
	Sewa Kendaraan dalam rangka kegiatan Kunjungan Kerjaa DPR RI Komisi IV lintas Kementerian/Lembaga	6.281.500
	Biaya Jasa perbaikan dukungan kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/lembaga	24.220.200
	Servis Perlengkapan Keselamatan dan PMK	23.310.000
	PJLP /PPNPN Non Data Base BKN	167.780.000
	Kebersihan	48.000.000
	Sopir	17.000.000
	THR PJLP /PPNPN Non Data Base BKN	33.556.000
	Kebersihan	9.600.000
	THR Sopir	3.400.000
	Keamanan	68.000.000
	THR Keamanan	13.600.000

Realisasi belanja jasa lainnya mencakup berbagai jenis layanan jasa yang mendukung operasional dan kegiatan strategis satuan kerja. Nilai realisasi sebesar Rp. 426.207.700, sebagian besar digunakan untuk pembayaran honor dan tunjangan hari besar keagamaan PJLP/ PPNPN NonData Base BKN lingkup PSDKP Lampulo.

Akun	Item Belanja	Jumlah
523111	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**7.000.000,**
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Bertingkat Administrasi (Lampulo)	7.000.000

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direalisasikan melalui item pembayaran bangunan gedung kantor permanen bertingkat berupa kegiatan rehabilitasi dapur kotor gedung B pangkalan PSDKP Lampulo oleh CV. Mitra sejati senilai Rp. 7.000.000.

Akun	Item Belanja	Jumlah
523123	**Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**6.800.000,**
	Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas	2.800.000
	Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Rigid Inflatable Boat	4.000.000

Realisasi belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin periode ini digunakan untuk pengadaan suku cadang kapal pengawas Hiu 12 berupa baterai *swicth on off* dan air aki baterai senilai masing-masing Rp. 1.960.000 dan Rp. 840.000 serta baterai *Rigid Inflatable Boat* tipe 120 V RIB senilai Rp. 4.000.000.

Akun	Item Belanja	Jumlah
523121	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**170.275.640**
	Perawatan Rutin Bulanan KP Hiu 12 (32 m)	6.636.000
	Perawatan Rutin Bulanan KP Hiu Macan 05 (36 m)	7.558.000
	Perawatan Darurat KP Hiu 12 (32 m)	1.990.000
	Perawatan Darurat KP Hiu 12 dan Hiu Macan 05	45.310.000
	Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Baramundi 01	200.000
	Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 045	500.000
	Perawatan Rutin Bulanan Rigid Inflatable Boat	500.000
	Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Baramundi 01 (buka blokir)	200.000
	Printer (Lampulo dan KP HIU 12)	1.400.000
	AC Lampulo	2.800.000
	Kendaraan Roda 4 Satwas SDKP Aceh Barat	17.140.000
	Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Aceh Barat	1.199.000
	Laptop/PC/Note Book Satwas SDKP Aceh Barat	150.000
	Kendaraan Roda 4 Satwas SDKP Simeulu	5.556.000
	Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Simeulu	200.000
	Laptop/PC/Note Book Satwas SDKP Simeulue+Wilker	1.000.000
	Printer Satwas SDKP Simeulue+Wilker	750.000
	Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Sibolga	270.064
	Kendaraan Roda 4 Satwas SDKP Padang	6.834.565
	Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Padang	250.500
	Kendaraan Roda 4 Satwas SDKP Bengkulu	5.134.311
	Kendaraan Roda 2 Wilker Sabang	300.000
	Kendaraan Roda 4 Pick Up Lampulo	15.000.000
	Kendaraan Roda 4 Lampulo	39.079.400
	Kendaraan Roda 2 Lampulo	4.237.800
	Laptop/PC/Note Book Lampulo dan KP HIU 12	6.080.000

Rincian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan total anggaran sebesar Rp. 170.273.640 pada akun 523121 mencakup berbagai Pengeluaran kegiatan pemeliharaan, baik rutin maupun darurat, terhadap kapal patroli seperti KP

Hiu 12, KP Hiu Macan 05, serta speedboat dan *rigid inflatable boat*. Selain itu, terdapat pula pengeluaran untuk pemeliharaan peralatan penunjang seperti printer, laptop/PC, dan kendaraan roda 2 dan 4 di pangkalan PSDKP Lampulo dan Satwas SDKP (Satuan Pengawasan) di daerah seperti Aceh Barat, Simeulue, Padang dan Bengkulu.

Akun	Item Belanja	Jumlah
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251.981.072
	Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP KP HIU 12 dan HIU MACAN 05	46.866.998
	Perdin dalam rangka supervisi	37.916.690
	Konsultasi terkait sanksi Administratif	2.772.360
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Lampulo)	1.500.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Aceh Barat)	1.500.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Simeulue)	1.230.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Sibolga)	1.272.700
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Padang)	1.500.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut (Bengkulu)	1.500.000
	Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan (Lampulo)	1.490.000
	Pengawasan SDK Pangkalan PSDKP Lampulo	1.950.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan terkait pemeriksaan kedatangan kapal	35.270.695
	pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan (Aceh Barat)	1.440.000
	pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan (Simeulue)	1.497.800
	Pengawasan Prioritas Nasional Kampung Budidaya (Simeulue)	1.497.800
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Koordinasi/Supervisi/Undangan	2.171.785
	Pemindahtanganan BMN antara PSDKP Batam dengan PSDKP Lampulo	5.713.000
	Menghadiri Undangan/Konsultasi/Monev	85.023.541
	Perdin Asesment	10.585.619
	koordinasi teknis laporan kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo	2.640.000
	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	6.642.084

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) mencapai serapan anggaran sebesar Rp. 251.981.062. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk konsultasi teknis pengawasan

kapal KP Hiu 12 dan Hiu Macan 05, disusul oleh berbagai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut di sejumlah daerah (seperti Lampulo, Aceh Barat, Simeulue, Padang, Bengkulu, dan lainnya). Terdapat juga pengeluaran untuk pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan, pengawasan SDM dan prioritas nasional, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat dan koordinasi lintas instansi. Kegiatan lain seperti monitoring evaluasi, asesmen, serta pelaporan kinerja organisasi turut didukung melalui anggaran ini.

Akun	Item Belanja	Jumlah
524113	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**	**3.519.000,**
	Pangkalan PSDKP Lampulo	680.000
	Satwas SDKP Padang	340.000
	Satwas SDKP Bengkulu	339.000
	Pengawasan SDK Pangkalan PSDKP Lampulo	510.000
	Koordinasi Instansi Daerah	1.650.000

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam kota mencapai serapan anggaran sebesar Rp. 3.519.000. Pengeluaran dialokasikan untuk berbagai kegiatan pengawasan baik di Pangkalaan PSDKP maupun Satwas di daerah.

Akun	Item Belanja	Jumlah
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.343.883,
	Rekonsiliasi Penyusunan laporan BMN dan Persediaan Tahun 2024	7.453.083
	Menghadiri Undangan/Bimtek Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	10.724.640
	Rekonsiliasi Penyusunan laporan Keuangan Tahunan 2024	13.166.160

Perbandingan Belanja Barang T.A 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	575.775.579	957.736.801	(39,88)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	2.466.137.116	2.932.576.855	(15,91)
Belanja Barang Persediaan (5218)	8.585.500	56.828.335	(84,89)
Belanja Jasa (5221)	644.997.649	443.408.339	45,46
Belanja Pemeliharaan (5231)	184.075.640	904.229.030	(79,64)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	286.843.955	1.741.618.812	(83,53)
Jumlah Belanja	**4.166.415.439**	**7.036.398.172**	**(40,79)**

Berdasarkan data pada tabel di atas, terjadi penurunan total alokasi anggaran sebesar 40,79% dari tahun 2024 ke tahun 2025, yaitu dari Rp. 7.036.398.172 menjadi Rp. 4.166.445.439. Penurunan ini tercermin hampir di seluruh jenis belanja, kecuali pada Belanja Jasa (5221) yang mengalami kenaikan sebesar 45,46%, dari Rp. 443.408.339 menjadi Rp. 644.997.649.

Belanja Barang Operasional (5211) mengalami penurunan paling signifikan kedua, yaitu sebesar 39,88%, yang kemungkinan berkaitan dengan efisiensi penggunaan barang habis pakai atau penyesuaian kebutuhan operasional. Sementara itu, Belanja Barang Persediaan (5218) menurun drastis sebesar 84,89%, menunjukkan adanya strategi pengendalian atau optimalisasi stok yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya sesuai regulasi terkait efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran 2025.

Belanja Pemeliharaan (5231) dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) juga mengalami penurunan yang besar, masing-masing sebesar 80,64% dan 83,53%. Ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya penghematan anggaran, pengurangan mobilitas pegawai, atau perubahan strategi pengawasan dan koordinasi yang lebih mengandalkan

teknologi dan metode daring sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Belanja barang Semester 1 Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 40,79%.

Selain itu rendahnya realisasi anggaran belanja barang periode ini disebabkan karena adanya penurunan hari operasi kapal pengawas dimana pada Tahun 2024 sebanyak 40 hari, sedangkan pada Tahun 2025 turun menjadi 12 hari operasi.

Mutasi pemakaian BBM KP. Hiu 12 hingga 30 Juni 2025 disajikan sebagai berikut:

TABEL PEMAKAIAN BBM KP. HIU 12 SEMESTER 1 TAHUN 2025

BULAN	TANGGAL BBM AWAL	SISA BBM AWAL	PENGISIAN	PEMAKAIAN	SISA BBM AKHIR	TANGGAL BBM AKHIR
JANUARI	31 Desember 2024	4.360	-	1.240	3.120	31 Januari 2025
FEBRUARI	31 Januari 2025	3.120	-	310	2.810	28 Februari 2025
MARET	28 Februari 2025	2.810	-	290	2.520	28 Maret 2025
APRIL	28 Maret 2025	2.520	10.000	3.010	9.510	30 April 2025
MEI	30 April 2025	9.510	36.000	42.930	2.580	28 Mei 2025
JUNI	28 Mei 2025	2.580	-		2.580	

Perbandingan antara penyerapan anggaran tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya penyesuaian strategi pengelolaan keuangan yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas

Belanja Modal Rp. 19.191.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.191.000 dan Rp. 1.194.352.100. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni TA 2025 sebesar 0,84 % dengan anggaran sebesar Rp 2.290.993.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.268.000	19.191.000	4,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.478.725.000	0	-
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	392.000.000	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**2.290.993.000**	**19.191.000**	**0,84**
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	**2.290.993.000**	**19.191.000**	**0,84**

Pada 30 Juni 2025 belanja modal Pangkalan PSDKP Lampulo telah direalisasikan sebesar 0,84%. Realisasi ini sepenuhnya berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan pos lainnya seperti Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Lainnya belum ada penyerapan anggaran sama sekali.

Perbandingan Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.191.000	502.562.800	(96,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	691.789.300	(100)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja	**19.191.000**	**1.194.352.100**	**(98,39)**

Belanja Modal Semester 1 Tahun 2025 menurun sebesar 98,39 % sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menurun 100% jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi terkait kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Pangkalan PSDKP Lampulo untuk semester yang berakhir 30 Juni 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir 30 Juni 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 19.191.000 dan Rp. 502.562.800. Belanja peralatan dan mesin periode 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar 4,57% dari pagu anggaran Rp. 420.268.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	19.191.000	502.562.800	(96,18)
Penambahan Nilai Alsin			
Jumlah Belanja Kotor	**19.191.000**	**502.562.800**	**(96,18)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**19.191.000**	**502.562.800**	**(96,18)**

Belanja Modal peralatan Mesin menurun sebesar 96,18 % jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Belanja peralatan dan mesin periode 30 Juni 2025 adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda tipe New Beat Sporty CBS dengan harga Rp.19.191.000.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.691.789.300.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	597.232.000	(100)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	94.557.300	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**691.789.300**	(100)
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja	**0**	**691.789.300**	**(100)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pangkalan PSDKP Lampulo realisasi 30 Juni 2025 adalah nihil. Tahun 2025 terdapat anggaran pembangunan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.478.725.000, namun belum ada realisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**-**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 300.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 Rp. 300.000.000 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan. Kas di Bendahara Pengeluaran semester 1 yang berakhir per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Juni TA 2025

Keterangan	30 Juni 2025
A. Kas di Bendahara Pengeluaran	290.007.964
'- BP Kas Tunai	42.418.237
'- BP Kas UM (voucher)	180.479.583
'- BP BPP	67.110.114
B. Kuitansi UP belum di-SPJkan	9.992.036
Jumlah	**300.000.000**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaaan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Belanja Bayar Dimuka Rp Rp.0

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 6.666.667.

Rincian Belanja Bayar dimuka 30 Juni Tahun 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Bayar Dimuka (Prepaid)	-	6.666.667
Jumlah	**-**	**6.666.667**

Saldo belanja bayar dimuka awal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Bayar Dimuka Desember 2024 Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Uraian Sewa	Uraian		
		Nilai Kontrak	Kontrak Berjalan	Sisa Kontrak
1	Sewa Gedung Pelayanan Satwas Aceh Barat dengan Masa Kontrak 1 tahun Mulai dari Tanggal 10 Februari 2024 s.d 09 Februari 2025 sesuai dengan Kontarak Nomor: B.258/PSDKPLan.1/PL.421/II/2024	15.000.000	13.750.000	1.250.000
2	Sewa Gedung Pelayanan Aceh Selatan (Sawang) Wilker Tapaktuan Satwas SDKP Simeulue TA. 2024 mulai 01 Februari 2024 s.d 31 Januari 2025) Sesuai dengan Kontrak Nomor: B.113/PSDKPLan.1/PL.720/I/2024	15.000.000	13.750.000	1.250.000
3	Sewa Gedung Pelayanan Pangkalan PSDKP Lampulo mulai 01 Maret 2024 s.d 28 Februari 2025	25.000.000	20.833.333	4.166.667
	Total			**6.666.667**

Nilai belanja bayar dimuka tersebut telah dilakukan memo penyesuian jurnal balik karena masa kontrak telah berakhir, sehingga nilai belanja bayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp. 0.

Uang Muka Belanja (Prepayment) Rp. 0

C.5 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka Belanja (*prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) Tahun 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Muka Belanja Prepayment	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang berakhir tanggal tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Piutang PNBP Rp.0

C.7 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp 0.

C.8 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang tak tertagih telah dilakukan koreksi. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar TPA Rp.0

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupaka estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR.

Persediaan Rp 317.171.735

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan per yang berakhir 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 317.171.735 dan Rp. 213.895.710. dan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni *TA 2025 dan 2024*

Jenis	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	17.989.110	10.885.610
Bahan Baku		
Suku Cadang	299.182.625	203.010.100
Barang Persediaan untuk strategis berjaga-jaga	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**317.171.735**	**213.895.710**

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang total realisasinya sebesar Rp. 213.895.710, maka terjadi kenaikan sebesar 48,27% pada tahun 2025. Persediaan Barang konsumsi naik dari Rp. 10.885.610 menjadi Rp. 17.989.110 atau meningkat sebesar 65,27%. Begitu juga barang persediaan Suku cadang naik dari Rp. 203.010.100 menjadi Rp. 299.182.625 atau meningkat 47,34%.

Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan operasional, yang bisa disebabkan oleh usia pakai kendaraan/alat yang menua, peningkatan intensitas operasional, atau antisipasi terhadap kebutuhan tak terduga di lapangan.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi Persediaan Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1042/PSDKPLan.1/PL.450/VI/2025 tanggal 30 Juni. Persediaan barang konsumsi berupa alat tulis kantor (ATK), dan *computer supply*. Suku cadang berupa suku cadang Kp. Hiu 012 dan Hiu Macan 05.

Rincian item Barang Konsumsi dan Suku Cadang disajikan pada tabel berikut:

KODE	U R A I A N	NILAI (Rp)
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	633.500
1010301003	Penjepit Kertas	247.000
1010301005	Buku Tulis	111.000
1010301006	Ordner Dan Map	130.500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	154.000
1010301010	Alat Perekat	67.000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1.114.910
1010302001	Kertas HVS	2.841.000
1010302003	Kertas Cover	40.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	4.916.000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	75.000
1010306009	Accu	7.570.200
1010306010	Batu Baterai	89.000
	Jumlah per Akun	**17.989.110**
117114	**Suku Cadang**	
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	271.610.225
1010202002	Suku Cadang Alat Besar Apung	27.572.400
	Jumlah per Akun	**299.182.625**
	TOTAL	**317.171.735**

Berdasarkan data anggaran tahun 2025, total alokasi untuk barang persediaan adalah sebesar Rp. 317.171.735, yang terdiri dari Barang Konsumsi senilai Rp. 17.989.110 dan Suku Cadang senilai Rp. 299.182.625. Pada komponen barang konsumsi, pengadaan difokuskan pada kebutuhan

kantor seperti alat tulis, tinta printer, kertas, dan baterai, yang penting untuk mendukung operasional administrasi harian. Sementara itu, alokasi terbesar adalah untuk suku cadang alat angkutan dan alat besar Rp. 299.182.625 juta, menunjukkan prioritas pada pemeliharaan peralatan operasional, khususnya kendaraan dan mesin besar

Mutasi Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Persediaan 01 Januari 2025	**213.895.710**
Mutasi Tambah	
Pembelian Persediaan Barang Konsumsi	9.004.500
Pembelian Suku Cadang	6.800.000
Transfer masuk suku cadang	550.027.664
Pendapatan Persediaan (LO)	-
Total Mutasi Tambah	**565.832.164**
Mutasi Kurang	
Habis Pakai Barang Konsumsi	1.901.000
Hasil Opname Fisik	428.553.063
Habis Pakai Suku Cadang	32.102.076
Total Mutasi kurang	**462.556.139**
Saldo Akhir 30 Juni 2025	**317.171.735**

- Rincian item Pembelian Persediaan Barang Konsumsi dan Pembelian Suku Cadang disajikan pada tabel dibawah ini:

KODE	U R A I A N	NILAI
117111	**Barang Konsumsi**	**9.004.500**
1010301001	Alat Tulis	613.000
1010301003	Penjepit Kertas	247.000
1010301005	Buku Tulis	111.000
1010301006	Ordner Dan Map	168.000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	154.000
1010301010	Alat Perekat	77.500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	803.000
1010302001	Kertas HVS	3.232.000
1010302003	Kertas Cover	40.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	3.440.000
1010306010	Batu Baterai	119.000
117114	**Suku Cadang**	**6.800.000**
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung	6.800.000
000020	Batery Swicth On Off 51.065060106 Hiu	1.960.000
000180	Battery 120 V RIB	4.000.000
000181	Air Accu Battery	840.000

- Transfer suku cadang berupa suku cadang dari kapal pengawas Hiu Macan 05 senilai Rp. 550.027.664.
- Hasil opname fisik senilai Rp. 428.553.063 adalah peralatan dan perlengkapan kapal pengawas Hiu Macan 05.
- Rincian item realisasi anggaran mutasi kurang berupa Habis Pakai Barang Konsumsi dan Habis pakai suku cadang disajikan pada tabel dibawah ini:

KODE	URAIAN	NILAI
117111	**Barang Konsumsi**	**-1.901.000**
1010301001	Alat Tulis	-35.000
1010301006	Ordner Dan Map	-37.500
1010301010	Alat Perekat	-10.500
1010302001	Kertas HVS	-775.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	-1.000.000
1010306010	Batu Baterai	-30.000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor	-13.000
117114	**Suku Cadang**	**-32.102.076**
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung	-32.102.076
000019	Oil Filter 2654407 Hiu 12	-2.997.000
000020	Batery Swicth On Off 51.065060106 Hiu	-1.960.000
000022	Filter Fuel Separator (Racor) 2020 PM Hiu	-743.700
000140	Filter Fuel Separator (Racor) 2010 PM Hiu	-1.487.400
000141	Fuel Filter 36944 Hiu 12 2024	-2.775.000
000180	Battery 120 V RIB	-4.000.000
000181	Air Accu Battery	-840.000
000182	KP. HMC 5 (ELEMENT FILTER GEARBOX-	-10.878.736
000183	KP. HMC 5 (Fuel Filter Besar-26560143)	-1.290.930
000184	KP. HMC 5 (Fuel Filter Kecil-26560145)	-1.298.700
000185	KP. HMC 5 (Oil Filter-2654403)	-816.960
000186	KP. HMC 5 (Air Filter Besar-26510342)	-2.208.900

Persediaan yang Belum Diregister Rp.0

C.14 Persediaan yang Belum Diregister Rp0.

Persediaan yang belum Diregister tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti

C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan

Rugi (TP/ TGR) Rp.0

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatau kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0

C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp.0

C.17 Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp 6.263.317.551

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah adalah tetap senilai Rp. 6.263.317.551.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**Rp**	**6.263.317.551**
Mutasi Tambah :		
Pembelian		-
Selisih Revaluasi Aset		-
Hibah		-
Reklasifikasi		-
Pengembangan Melalui KDP		-
Mutasi Kurang :		
Koreksi pencataan nilai/kuantitas(-)		-
Penghapusan		
Saldo per 30 Juni 2025		**6.263.317.551**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025		-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**Rp**	**6.263.317.551**

Tanah Belum Diregister Rp.0

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap tanah belum diregister tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Peralatan dan Mesin Rp. 74.190.417.364

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah Rp. 74.190.417.364 dan Rp 46.350.966.244. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah berupa pembelian aset peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**46.350.966.244**
Mutasi tambah:	27.858.543.120
Penambahan saldo awal	
Pembelian (intrakompetable)	19.191.000
Transfer masuk	27.839.352.120
Koreksi penambahan Aset	
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi kurang:	(19.092.000)
Transfer keluar	(19.092.000)
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	**74.190.417.364**
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2025	(71.705.559.209)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**2.484.858.155**

Rincian mutasi tambah baik berupa pembelian (*intrakompetable*) maupun transfer masuk disajikan dalam tabel dibawah ini:

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai
132111	**PERALATAN DAN MESIN**	**124**	**27.858.793.120**
30103	ALAT BANTU	2	9.038.500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	33.691.000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	26.044.915.000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	88.631.510
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	9	37.226.400
30303	ALAT UKUR	1	1760000
30501	ALAT KANTOR	12	427.826.000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	50	247.064.350
30601	ALAT STUDIO	5	34.769.300
30602	ALAT KOMUNIKASI	13	67.311.000
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2	519900000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	3	10950000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	84400000
31001	KOMPUTER UNIT	7	100.117.610
31002	PERALATAN KOMPUTER	5	15.516.850
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	3550000
31503	ALAT SAR	5	131.875.600
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1	250000

- Alat angkutan bermotor pada akun 30210 sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 33.691.000 merupakan nilai pembelian (intrakompetabel) satu unit sepeda motor merek Honda Tipe *New Beat Sporty CBS*. Seharga Rp. 19.191.000 dan satu unit sepeda motor lama pada kapal

pengawas Hiu Macan 05 senilai Rp. 14.500.000 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B.7/PSDKPLan.1/PL.510/II/2025 Tanggal 1 Januari 2025

- Transfer masuk dari pangkalan PSDKP Batam berupa peralatan dan perlengkapan kapal Pengawas Hiu Macan 05 senilai Rp. 27.823.835.270 sesuai dengan nomor BAST: B.236/PSDKPLan.1/PL.760/I/2025 Tanggal 1 Januari 2025 dan satu unit laptop milik kepala pangkalan dari stasiun Pontianak senilai Rp. 15.516.850.
- Transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Lampulo ke sesdit senilai Rp. 19.092.000 berupa satu unit laptop sesuai dengan BAST: B.235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Gedung dan Bangunan Rp. 15.242.325.758.

C.23 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah Rp. 15.242.325.758 dan Rp. 15.243.825.758. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**15.243.825.758**
Mutasi Tambah:	
Perolehan dengan KDP	
Pengembangan dengan KDP	
Reklasifikasi masuk	
Koreksi nilai tim penertiban aset (+)	
Barang tidak ditemukan hasil inventarisasi	
Barang berlebih hasil inventarisasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi nilai tim penertiban aset (-)	
Koreksi semu hasil penilaian kembali	
Reklasifikasi keluar	
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas(-)	(1.485.000)
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	**15.242.325.758**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(1.909.787.110)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**13.332.538.648**

Koreksi pencatatan nilai/ kuantitas sebesar Rp. 1.485.000 adalah koreksi atas nilai aset non revaluasi atas pengembalian lebih bayar item pekerjaan listrik dan air senilai Rp. 1.500.000 untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Kantor Satwas SDKP Padang dengan nilai kontrak Rp. 1.306.857.800 yang telah selesai pada bulan Desember Tahun 2024. Sisa koreksi atas nilai aset non revaluasi senilai Rp. 15.000 tidak mempengaruhi nilai aset karena sudah dikeluarkan sebagai nilai koreksi pencatatan nilai berkurang bangunan gedung kantor permanen pada laporan monitoring jurnal.

Rincian nilai mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	37	15.242.325.758	(1.909.787.110)	13.332.538.648
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26	12.235.261.911	(1.469.322.668)	10.765.939.243
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	6	2.176.491.618	(339.665.930)	1.836.825.688
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1	66.835.000	(15.664.455)	51.170.545
40401	TUGU/TANDA BATAS	4	763.737.229	(85.134.057)	678.603.172

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp.0

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Nilai Gedung dan Bangunan Belum Diregister tanggal 30 Juni 2025 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp. 2.100.578.762

C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah tetap sebesar Rp 2.100.578.762 dan Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**2.100.578.762**
Mutasi tambah:	
Belanja Modal jaringan (Jaringan listrik)	-
Jaringan Distribusi	-
Jalan dan Jembatan	-
Irigasi	-
Reklasifikasi masuk	-
Transfer masuk Nilai Jalan, Jaringan, irigasi	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi semu hasil penilaian kembali	-
Koreksi pencataan nilai/kuantitas(-)	-
Saldo per 30 Juni 2025	**2.100.578.762**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(659.430.190)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**1.441.148.572**

Rincian nilai mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut:

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
134111	JALAN DAN JEMBATAN	933	640.828.171	(426.394.737)	214.433.434
134112	IRIGASI	5	1.115.452.260	(187.098.483)	928.353.777
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	402.296.000	(56.321.440)	345.974.560
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	386.120.000	(60.966.315)	325.153.685
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	229.432.000	(61.181.872)	168.250.128
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	77.800.260	(1.945.006)	75.855.254
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	1	19.804.000	(6.683.850)	13.120.150
134113	JARINGAN	17	344.298.331	(45.936.970)	298.361.361
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	12.849.908	(6.124.851)	6.725.057
50402	JARINGAN LISTRIK	8	294.718.765	(16.994.288)	277.724.477
50403	JARINGAN TELEPON	6	36.729.658	(22.817.831)	13.911.827
	TOTAL		**2.100.578.762**	**(659.430.190)**	**1.441.148.572**

Jalan, Jambatan dan Irigasi yang Belum Diregister Rp.0

C.26 Jalan, Jembatan dan Irigasi Belum Diregister

Nilai Jalan, Jambatan dan Irigasi yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tetap Lainnya Rp.0

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**0**
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo per 30 Juni 2025	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**0**

Aset Tetap Belum Diregister Rp.0.

C.28 Aset Tetap Belum Diregister

Aset Tetap yang Belum Diregister tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 10.000.000

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah tetap sebesar Rp. 10.000.000.

Mutasi KDP adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**10.000.000**
Mutasi tambah:	**-**
Gedung dan bangunan dalam pengerjaan	-
Jalan dalam pengerjaan	-
Mutasi kurang:	**-**
Gedung dan bangunan dalam pengerjaan	-
Jalan dalam pengerjaan	-
Selisih	**-**
Saldo per 30 Juni 2025	**10.000.000**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp.10.000.000 adalah berupa Perencanaan Penataan Lingkungan Komplek Satwas SDKP Aceh Barat dengan nilai Rp. 10.000.000 pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh CV. Tessa Engineering Consultant berdasarkan kontraktual nomor: 00132/UP_TUP/065135/2024 tanggal 08 November 2024 dan BAST Nomor: 0698/PSDKPLan.1/PL.430/XI/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan nomor NUP 4.

Pada tahun 2025 ini telah diusulkan penghapusan/penghentian KDP Perencanaan Landscape Kantor SDKP Aceh Barat dengan nilai sebesar Rp.10.000.000, sesuai dengan surat Berita acara invetarisasi barang milik negara Nomor B. 1036.1/PSDKPLan.1/PL.710/VII/2025 tanggal 30 Juni 2025. Perubahan tersebut dilakukan karena efisiensi anggaran pada tahun berjalan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (74.274.776.509)

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing – masing senilai Rp (74.274.776.056) dan Rp (44.186.174.056).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama

masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6.263.317.551	-	6.263.317.551
2	Peralatan dan Mesin	74.190.417.364	(71.705.559.209)	2.484.858.155
3	Gedung dan Bangunan	15.242.325.758	(1.909.787.110)	13.332.538.648
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.100.578.762	(659.430.190)	1.441.148.572
5	Konstruksi Dalam pengerjaan	10.000.000	-	10.000.000
Total		**97.806.639.435**	**(74.274.776.509)**	**23.531.862.926**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp.0

C.31 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud Rp.0

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) yang berakhir tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp.0

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan

Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Aset Lain-Lain Rp.0

C.34 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain yang berakhir tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan sedang dalam proses usulan pengapusan.

Aset Lainnya Belum Diregister Rp.0

C.35 Aset Lainnya Belum Diregister

Aset Lainnya yang Belum Diregister tanggal per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 428.223.831

C.37. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 428.223.831 dan Rp. 33.188.699. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang pihak ketiga pada Tahun 2025 tersebut disajikan pada rincian berikut:

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp. 289.460.831 berupa beban belanja gaji induk pegawai ASN senilai Rp. 216.514.598 dan PPPK senilai Rp. 72.946.233.
2. Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp. 138.763.000 berupa perjalanan dinas sebesar Rp. 13.173.000, honor PPNPN bulan Juni untuk 17 pegawai senilai Rp. 63.869.000 dan honor PJLP bulan Juni dan Mei untuk 8 orang sebesar Rp. 61.721.740.

Utang pihak ketiga pada tahun 2024 telah dibayarkan sesuai rincian di bawah ini melalui jurnal balik tanggal 31 Januari 2025.

No	Uraian	Nilai
1,	Belanja Langganan Listrik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2024	19.880.497
2,	Belanja Langganan Internet dan Telepon Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2024	13.006.594
3,	Belanja Langganan Air Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2024	301.608
Total Belanja Barang yang masih harus dibayar		**33.188.699**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan Rp.22.536.952

C.38 Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 22.536.952 dan Rp.0. Utang Yang Belum Ditagihkan adalah adanya transaksi keuangan yang dilakukan penginputan di Bulan Juni 2025 pada modul komitmen, namun SPM terbit pada Bulan Juli 2025.

Hibah yang Belum Disahkan Rp.0.

C.39 Hibah yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp.0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp.0

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Uang Muka dari KPPN Rp. 300.000.000

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang

diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.0.

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 428.223.831

C.44 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar yang pada tanggal 30 Juni 2025 senilai Rp. 428.223.831. Rincian beban yang harus dibayar berupa belanja gaji pokok pegawai ASN dan PPPK senilai Rp. 289.460.831 yang terdiri dari beban belanja gaji induk pegawai ASN senilai Rp. 216.514.598 dan PPPK senilai Rp. 72.946.233 serta belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp. 138.763.000 terdiri dari perjalanan dinas sebesar Rp. 13.173.000, honor PPNPN bulan Juni untuk 17 pegawai senilai Rp. 63.869.000 dan honor PJLP bulan Juni dan Mei untuk 8 orang sebesar Rp. 61.721.740.

Ekuitas Rp. 23.398.273.878

C.45 Ekuitas

Ekuitas yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 23.398.273.878 dan Rp. 25.969.887.937. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2025 *dan 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK TURUN (%)
Pendapatan Operasional	0	0	
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Berdasarkan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.

Beban Pegawai Rp 5.081.477.375

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.081.477.375 dan Rp. 4.963.867.238. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai hingga periode 30 Juni 2025 disajikan pada rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.592.247.500	1.621.782.300	(1,82)
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.368	25.173	(15,12)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	120.707.450	118.588.250	1,79
Beban Tunj. Anak PNS	43.567.246	42.524.368	2,45
Beban Tunj. Struktural PNS	17.280.000	21.060.000	(17,95)
Beban Tunj. Fungsional PNS	45.335.000	38.925.000	16,47
Beban Tunj. PPh PNS	12.925.017	12.434.432	3,95
Beban Tunj. Beras PNS	99.649.920	100.156.860	(0,51)
Beban Uang Makan PNS	119.102.000	94.195.000	26,44
Beban Tunjangan Umum PNS	50.495.000	54.445.000	(7,26)
Beban Gaji Pokok PPPK	519.690.600	511.145.000	1,67
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.257	11.610	(11,65)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	39.348.000	36.304.370	8,38
Beban Tunjangan Anak PPPK	13.270.374	12.978.446	2,25
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	45.090.000	44.550.000	1,21
Beban Tunjangan Beras PPPK	39.106.800	37.875.660	3,25
Beban Uang Makan PPPK	28.337.000	21.853.000	29,67
Beban Uang Lembur	16.306.000	71.303.000	(77,13)
Beban Uang Lembur PPPK	5.547.000	14.009.000	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.742.341.530	1.591.070.329	9,51
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	531.099.313	518.630.440	2,40
Jumlah Beban	**5.081.477.375**	**4.963.867.238**	**2,37**

Beban pegawai 30 Juni 2025 meningkat meningkat tidak signifikan yakni sebesar 2,37% jika dibandingkan dengan 30 Juni 2024.

Penjelasan lebih lanjut atas perbedaan belanja dan beban pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Perbedaan Belanja dan Beban Pegawai
TA 2025 dan 2024

URAIAN	BEBAN	BELANJA	SELISIH
Gaji Pokok PNS	1.592.247.500	1.417.150.000	175.097.500
Pembulatan Gaji PNS	21.368	19.156	2.212
Tunj. Suami/Istri PNS	120.707.450	107.468.040	13.239.410
Tunj. Anak PNS	43.567.246	38.760.848	4.806.398
Tunj. Struktural PNS	17.280.000	15.480.000	1.800.000
Tunj. Fungsional PNS	45.335.000	40.280.000	5.055.000
Tunj. PPh PNS	12.925.017	12.944.071	(19.054)
Tunj. Beras PNS	99.649.920	88.714.500	10.935.420
Uang Makan PNS	119.102.000	119.102.000	-
Tunjangan Umum PNS	50.495.000	44.965.000	5.530.000
Gaji Pokok PPPK	519.690.600	461.947.200	57.743.400
Pembulatan Gaji PPPK	10.257	9.110	1.147
Tunjangan Suami/Istri PPPK	39.348.000	34.976.000	4.372.000
Tunjangan Anak PPPK	13.270.374	11.795.888	1.474.486
Tunjangan Fungsional PPPK	45.090.000	40.080.000	5.010.000
Tunjangan Beras PPPK	39.106.800	34.761.600	4.345.200
Uang Makan PPPK	28.337.000	28.337.000	-
Uang Lembur PNS	16.306.000	16.306.000	-
Uang Lembur PPPK	5.547.000	5.547.000	-
Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.742.341.530	1.742.341.530	-
Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	531.099.313	531.099.313	-
Jumlah Belanja	**5.081.477.375**	**4.792.084.256**	**289.393.119**

Selisih senilai Rp. 289.393.119 adalah Beban belanja pegawai yang masih harus dibayar Bulan Juli 2025 berupa Gaji PNS/PPPK dan honor PPNPN yang SPMnya terbit di Bulan Juni namun SP2D terbit di Bulan Juli 2025.

Beban Persediaan Rp. 1.901.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.901.000 dan Rp. 60.374.985. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.901.000	60.374.985	(96,85)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	**1.901.000**	**60.374.985**	**(96,85)**

Beban persediaan berakhir tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar 96,85% % dibandingkan 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Penjelasan perbandingan Belanja dan Beban Persediaan Konsumsi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

URAIAN	BEBAN	BELANJA	SELSISH
Beban Persediaan Konsumsi	1.901.000	8.585.500	(6.684.500)
Jumlah	**1.901.000**	**8.585.500**	**(6.684.500)**

Selisih tersebut adalah karena adanya penggunaan barang konsumsi pembelanjaan Tahun 2025 yang belum digunakan.

Beban Barang dan Jasa Rp. 3.805.356.152.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.805.356.152 dan Rp. 9.356.113.160. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	542.361.679	788.465.698	(31,21)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	57.954.400	52.781.355	9,80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	988.500	3.257.100	(69,65)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.890.000	49.440.000	(9,20)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	158.816.650	(100)
Beban Bahan	2.345.123.600	2.765.250.320	(15,19)
Beban Honor Output Kegiatan	0	18.700.000	(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	122.863.516	148.626.535	(17,33)
Beban Langganan Listrik	116.677.649	113.387.320	2,90
Beban Langganan Telepon	63.627.567	62.777.639	1,35
Beban Langganan Air	2.838.874	5.009.066	(43,33)
Beban Sewa	21.666.667	91.797.500	(76,40)
Beban Jasa Profesi	0	36.700.000	(100)
Beban Jasa Lainnya	486.363.700	139.437.250	248,80
Total	**3.805.356.152**	**4.434.446.433**	**(14,19)**

Beban Barang hingga periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan tidak signifikan yakni sebesar 14,19% jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

Beban Pemeliharaan Rp. 640.670.891

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 640.670.891 dan Rp 872.057.630. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, beban persediaan bahan untuk pemeliharaan, dan beban persediaan suku cadang. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000	297.771.205	(97,65)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.015.752	530.666.325	(67,40)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	700.000	(100)
Beban Persediaan Suku Cadang	460.655.139	42.920.100	973,29
Total	**640.670.891**	**872.057.630**	**(26,53)**

Belanja pemeliharaan pada 30 Juni 2025 menurun sebesar 26,53% jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

Beban Perjalanan Dinas Rp. 300.016.955

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 300.016.955 dan Rp. 1.782.434.528. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi koordinasi ke satker dan pusat yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	265.154.072	1.515.331.408	(82,50)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.519.000	67.050.000	(94,75)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.343.883	30.000.000	4,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		170.053.120	(100)
Total	**300.016.955**	**1.782.434.528**	(83,17)

Realisasi belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas belanja perjalanan biasa, dinas dalam kota, dan paket meeting luar kota. Beban perjalanan dinas

Periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 83,17% jika dibandingkan 30 Juni Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 3.555.284.704

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.555.284.704 dan Rp. 2.633.426.303. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024. adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.342.767.387	2.468.849.813	35,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	157.957.394	122.574.256	28,87
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	36.685.591	26.955.591	36,10
Beban Penyusutan Irigasi	13.131.301	12.158.798	8,00
Beban Penyusutan Jaringan	4.743.031	2.887.845	64,24
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**3.555.284.704**	**2.633.426.303**	**35,01**

Beban Penyusutan dan Amortisasi aset pada Tahun 2025 meningkat sebesar 35,01%.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk smencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp.0

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus *(Defisit)* Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. (384.157.835).

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar TA 2025 dan 2024

Uraian Akun	TA 2025	TA 2024	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan aset Non Lancar	-	384.157.835	-
Jumlah Surplus (Defisit)	**-**	(384.157.835,00)	**-**

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp.(13.348.707.077)

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Jumlah Surplus *(Defisit)* dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (13.384.707.077) dan Rp. (14.746.607.115).

Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)%
Defisit dari Kegiatan Operasional	(13.384.707.077)	(14.746.607.115)	(9,24)
Jumlah Surplus (Defisit)	(13.384.707.077)	(14.746.607.115)	(9,24)

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp.0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp *1.500.000*

D.14 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp. (384.157.835) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	(384.157.835)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.500.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**1.500.000**	**(384.157.835)**

- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp. 1.500.000 adalah pengembalian pembayaran atas kelebihan bayar pada item pekerjaan listrik dan air kerja, karena pada saat Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Kantor Satwas SDKP Padang dengan nilai kontrak Rp. 1.306.857.800 penyedia menggunakan listrik dan air Kantor Satwas SDKP Padang.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. (13.383.207.077)

D.15 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus /Defisit sebelum pos luar biasa 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (13.383.207.077) dan Rp. (15.130.764.950).

Pos Luar Biasa Rp.0

D.16 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos luar biasa untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp.0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 25.969.887.937

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar dan Rp. 25.969.887.937 dan dan Rp. 24.065.064.343.

Defisit LO Rp. (13.383.207.077)

E.2 (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.(13.383.207.077) dan Rp (15.130.764.950). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Rp 1.485.000

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (1.485.000) dan Rp. (2.811.998). Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas sebesar Rp. 1.485.000 adalah koreksi atas nilai aset non revaluasi atas pengembalian lebih bayar item pekerjaan listrik dan air senilai Rp. 1.500.000 untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Kantor Satwas SDKP Padang dengan nilai kontrak Rp. 1.306.857.800 yang telah selesai pada bulan Desember Tahun 2024. Sisa koreksi atas nilai aset non revaluasi senilai Rp. 15.000 tidak mempengaruhi nilai aset karena sudah dikeluarkan sebagai nilai koreksi pencatatan nilai berkurang bangunan gedung kantor permanen pada laporan monitoring jurnal.

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.(1.485.000)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.(1.485.000) dan Rp. (2.825.248). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp. 1.485.000 adalah koreksi atas pengembalian lebih bayar item pekerjaan listrik dan air senilai Rp. 1.500.000 pada pekerjaan Pembangunan Kontruksi Kantor Satwas SDKP Padang dengan

nilai kontrak Rp. 1.306.857.800 pada bulan Desember Tahun 2024. Selisih nilai koreksi atas nilai aset non revaluasi senilai Rp. 15.000 tidak mempengaruhi nilai aset karena sudah dikeluarkan sebagai nilai koreksi pencatatan nilai berkurang bangunan gedung kantor permanen pada laporan monitoring jurnal.

Koreksi Lain-Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 13.250. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lainnya adalah koreksi terhadap beban penyisihin piutang tak tertagih Tahun 2025 senilai 0.

Transaksi Antar Entitas Rp. 10.813.078.018

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.813.078.018 dan Rp. 12.896.162.004. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.500.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.977.622.983
Transfer Masuk	1.841.728.035
Transfer Keluar	(4.773.000)
Transfer masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**10.813.078.018**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 DDEL sebesar Rp.1.500.000 berupa pendapatan yang telah dijelaskan di pos pendapatan pada LRA. Sedangkan DKEL sebesar Rp. 8.977.622.983. adalah belanja Tahun 2025.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan transfer keluar periode 30 Juni 2025 adalah Rp. 1.841.728. 035 dan Rp. 4.773.000.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 30 Juni 2025 adalah Rp.0.

Ekuitas Akhir Rp.23.398.273.878

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.23.398.273.878 dan Rp. 21.827.649.399.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. **Aset Lancar – Persediaan**. Nilai Persediaan yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar **Rp. 317.171.735** terdiri dari mutasi tambah senilai Rp. 565.832.164 dan mutasi kurang senilai Rp. 462.556.139. Mutasi tambah berasal dari *belanja barang persediaan* senilai Rp. 9.004.500, *pembelian persediaan barang konsumsi* senilai Rp. 17.989.110, *pembelian suku cadang* Rp. 6.800.000 dan *transfer masuk* Rp. 550.027.664. Mutasi kurang berasal dari *habis pakai barang konsumsi* Rp. 1.901.000, *hasil opname fisik* Rp. 428.553.063, *habis pakai suku cadang* Rp. 32.102.076. Terdapat perbedaan nilai belanja barang persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni senilai **Rp. 8.585.500** dengan nilai pada daftar transaksi persediaan senilai **Rp. 9.004.500** dengan selisih sebesar *Rp. 419.000*. Hal ini bisa disebabkan karena Entitas mencatat belanja barang persediaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis kas, yaitu pada saat pembayaran dilakukan. Sementara dalam Laporan Realisasi Barang Persediaan (LRBP), pencatatan dilakukan berdasarkan basis akrual, yaitu saat barang secara fisik diterima atau hak kepemilikan dialihkan kepada entitas.

   Selisih tersebut disebabkan oleh 2 (dua) transaksi pembelian barang konsumsi yang telah dicatat dalam LRBP (basis akrual) tetapi belum dibayarkan (belum tercatat dalam LRA) per 30 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No. Dokumen	Kode Transaksi	Tanggal Jurnal	Nilai (Rp)
00014/UP_TUP/065135/2025	KOM-065135-411614126	24 Maret 2025	235.000
00015/UP_TUP/065135/2025	KOM-065135-411646717	24 Maret 2025	184.000
Total Selisih			**419.000**

Dengan demikian, selisih ini bersifat **sementara** dan akan terselesaikan pada saat pembayaran dilakukan.

2. **Kewajiban Jangka Pendek – Utang kepada pihak ketiga**. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp. 428.223.831 merupakan *belanja pegawai yang masih harus dibayar* senilai Rp. 289.460.831 berupa belanja gaji pokok pegawai ASN dan PPPK bulan Juli 2025. *Belanja barang yang masih harus dibayar* senilai Rp. 138.763.000 berupa perjalanan dinas sebesar Rp. 13.173.000, honor PPNPN bulan Juli untuk 17 pegawai senilai Rp. 63.192.740 dan honor PJLP bulan Juni dan Mei untuk 8 orang sebesar Rp. 61.721.740.

3. **Pengungkapan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**. Per 30 Juni 2025, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tercatat sebesar Rp10.000.000, yang berasal dari kegiatan Perencanaan Penataan Lingkungan Komplek Satwas SDKP Aceh Barat Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Tessa Engineering Consultant, berdasarkan kontrak nomor 00132/UP_TUP/065135/2024 tanggal 8 November

2024 dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 0698/PSDKPLan.1/PL.430/XI/2024 tanggal 24 Oktober 2024, dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 4. Namun, pada tahun 2025, telah dilakukan usulan penghapusan/penghentian saldo KDP tersebut dengan nilai sebesar Rp10.000.000, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Nomor B.1036.1/PSDKPLan.1/PL.710/VII/2025 tanggal 30 Juni 2025. Penghentian KDP ini dilakukan karena adanya efisiensi anggaran pada tahun berjalan, sehingga kegiatan lanjutan tidak dilaksanakan. Dengan demikian, nilai KDP sebesar Rp10.000.000 akan dilakukan reklasifikasi atau penghapusan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara dan akan disesuaikan dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya.

4. **Informasi Pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Lampulo.** Penghentiaan Aset dari Penggunaan berupa Speedboat/Motor Tempel sejumlah 1 (satu) Unit dengan nilai Rp. 448.635.000 sesuai Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Speedboat/Motor Tempel oleh Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor B.1130/PSDKPLan.1/PL.110/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025.

   Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Peralatan dan Mesin dari Sesditjen PSDKP Nomor: B.2575/PSDKP.1/PL.750Nl/2024 tanggal 24 Juni 2024, SK Persetujuan Penjualan

Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Dari Kementerian Keuangan Nomor:S 89/MK.6/KNL.0101/2024 tanggal 31 Juli 2024

5. **Penetapan Status Pengguna (PSP).**

- Tanah dengan jumlah 2 (dua) NUP yaitu tanah kantor Pangkalan PSDKP Lampulo dan Tanah Kantor Satwas SDKP Aceh Barat dengan nilai sebesar Rp. 2.523.418.451. Status tanah Satwas SDKP Aceh Barat dengan luas 632 M^2 senilai Rp. 79.000.000 sudah selesai proses hibah dengan BAST Nomor: 25/BAST-HIBAH/111/2023 tanggal 7 September 2024, Persetujuan Memo Penetapan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 817958528927195769 tanggal 8 Juli 2024 dengan Berita Acara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor BA-54/KPN.0101/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Surat Permohonan Hak Pakai Selama Dipergunakan ke BPN Aceh Barat Nomor B.994/PSDKPLan.1/TU.140/VI/2024 tanggal 14 Agustus 2024 belum diusulkan PSP menunggu Sertifikat Hak Pakai Tanah keluar dari BPN Kabupaten Aceh Barat.

  Status tanah Pangkalan PSDKP Lampulo dengan luas 8.910 M^2 senilai Rp. 2.443.433.451 sudah selesai proses hibah dengan PKS Nomor: 19/PKS/2024 dan 253/SJ/PL.750Nl/2024 tanggal 03 Juni 2024, Persetujuan Memo Penetapan Hibah Langsung Barang /Jasa/Surat

Berharga Nomor: 821789404976489260 tanggal 08 Desember 2024 dengan Berita Acara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor: BA-1/KPN.0101/2025 tanggal 31 Desember 2024, dan Perjanjian Pinjam pakai dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan B.1063/PSDKPLan.1/PL.720/III/2024. Proses pengurusan Sertifikat Hak Pakai Tanah sedang dalam tahap administrasi dengan Pemda Aceh dan belum diusulkan PSP menunggu Sertifikat Hak Pakai Tanah diterbitkan BPN Kota Banda Aceh.

- Kepemilikannya Peralatan dan mesin sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 19.191.000 (belum diusulkan PSP ke Sekretariat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Karena belum memiliki Surat kepemilikian.
- Gedung Bangunan dengan jumlah Nup 5 (Lima) dengan nilai sebesar Rp. 291.203.641 sudah diusulkan ke Sesdit PSDKP sesuai dengan surat Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo No. B.1358.3/PSDKPLan.1/KP.440/X/2025 tanggal 26 Juni 2025.

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032**

ESELON I : **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05**

SATUAN KERJA : **PANGKALAN PSDKP LAMPULO 065135**

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM
Tgl Cetak : 16/07/25 7:35 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**	**0**	**2,650,000**	**2,650,000**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,500,000	1,500,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**	**0**	**2,650,000**	**2,650,000**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	35,009,622,000	8,977,622,983	(26,031,999,017)	25.64	32,449,199,000	12,898,812,004	(19,550,386,996)	39.75
1. Belanja Pegawai	8,499,112,000	4,792,016,544	(3,707,095,456)	56.38	9,435,863,000	4,668,061,732	(4,767,801,268)	49.47
2. Belanja Barang	24,219,517,000	4,166,415,439	(20,053,101,561)	17.20	18,342,355,000	7,036,398,172	(11,305,956,828)	38.36
3. Belanja Modal	2,290,993,000	19,191,000	(2,271,802,000)	0.84	4,670,981,000	1,194,352,100	(3,476,628,900)	25.57
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032**
ESELON I : **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05**
SATUAN KERJA : **PANGKALAN PSDKP LAMPULO 065135**

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM
Tgl Cetak : 16/07/25 7:35 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**35,009,622,000**	**8,977,622,983**	**(26,031,999,017)**	**25.64**	**32,449,199,000**	**12,898,812,004**	**(19,550,386,996)**	**39.75**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS
NIP 198301312006041002

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:36 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	6,666,667	(6,666,667)	(100.00)
Persediaan	317,171,735	213,895,710	103,276,025	48.28
JUMLAH ASET LANCAR	**617,171,735**	**220,562,377**	**396,609,358**	**179.82**
ASET TETAP				
Tanah	6,263,317,551	6,263,317,551	0	0.00
Peralatan dan Mesin	74,190,417,364	46,350,966,244	27,839,451,120	60.06
Gedung dan Bangunan	15,242,325,758	15,243,825,758	(1,500,000)	(0.01)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,100,578,762	2,100,578,762	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,000,000	10,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(74,274,776,509)	(44,186,174,056)	(30,088,602,453)	68.10
JUMLAH ASET TETAP	**23,531,862,926**	**25,782,514,259**	**(2,250,651,333)**	**(8.73)**
JUMLAH ASET	**24,149,034,661**	**26,003,076,636**	**(1,854,041,975)**	**(7.13)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	428,223,831	33,188,699	395,035,132	1,190.27
Utang Yang Belum Ditagihkan	22,536,952	0	22,536,952	0.00
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**750,760,783**	**33,188,699**	**717,572,084**	**2,162.10**
JUMLAH KEWAJIBAN	**750,760,783**	**33,188,699**	**717,572,084**	**2,162.10**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,398,273,878	25,969,887,937	(2,571,614,059)	(9.90)
JUMLAH EKUITAS	**23,398,273,878**	**25,969,887,937**	**(2,571,614,059)**	**(9.90)**
JUMLAH EKUITAS	**23,398,273,878**	**25,969,887,937**	**(2,571,614,059)**	**(9.90)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**24,149,034,661**	**26,003,076,636**	**(1,854,041,975)**	**(7.13)**

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ESELON I : **(05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

SATUAN KERJA : **(065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO**

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:37 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,081,477,375	4,963,867,238	117,610,137	2.369
Beban Persediaan	1,901,000	60,374,985	(58,473,985)	(96.851)
Beban Barang dan Jasa	3,805,356,152	4,434,446,431	(629,090,279)	(14.186)
Beban Pemeliharaan	640,670,891	872,057,630	(231,386,739)	(26.533)
Beban Perjalanan Dinas	300,016,955	1,782,434,528	(1,482,417,573)	(83.168)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:37 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,555,284,704	2,633,426,303	921,858,401	35.006
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	13,384,707,077	14,746,607,115	(1,361,900,038)	(9.235)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,384,707,077)	(14,746,607,115)	1,361,900,038	(9.235)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(384,157,835)	384,157,835	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	384,157,835	(384,157,835)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,500,000	(384,157,835)	385,657,835	(100.39)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,383,207,077)	(15,130,764,950)	1,747,557,873	(11.55)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,383,207,077)	(15,130,764,950)	1,747,557,873	(11.55)

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:38 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	25,969,887,937	24,065,064,343	1,904,823,594	7.92
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,383,207,077)	(15,130,764,950)	1,747,557,873	(11.55)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,485,000)	(2,811,998)	1,326,998	(47.19)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,485,000)	(2,825,248)	1,340,248	(47.44)
LAIN-LAIN	0	13,250	(13,250)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,813,078,018	12,896,162,004	(2,083,083,986)	(16.15)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,571,614,059)	(2,237,414,944)	(334,199,115)	14.94
EKUITAS AKHIR	23,398,273,878	21,827,649,399	1,570,624,479	7.2

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:40 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,977,622,983
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,500,000	0
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,417,150,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,156	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107,468,040	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	38,760,848	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,480,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	40,280,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,944,071	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,714,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	119,102,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,965,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	461,947,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,110	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,976,000	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	11,795,888	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	40,080,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34,761,600	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,337,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	16,306,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	5,547,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,742,341,530	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	531,099,313	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	472,093,179	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	57,954,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	838,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,890,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,343,273,600	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	122,863,516	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,585,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	124,558,265	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	76,634,161	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,597,523	0
3.0	522141	Belanja Sewa	15,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	426,207,700	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,275,640	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,800,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251,981,072	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,519,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,343,883	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,191,000	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	67,712
JUMLAH			**8,979,190,695**	**8,979,190,695**

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS

198301312006041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:39 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,989,110	0
0.0	117114	Suku Cadang	299,182,625	0
0.0	131111	Tanah	6,263,317,551	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	74,190,417,364	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,242,325,758	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	640,828,171	0
0.0	134112	Irigasi	1,115,452,260	0
0.0	134113	Jaringan	344,298,331	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	10,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	71,705,559,209
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,909,787,110
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	426,394,737
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	187,098,483
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	45,936,970
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	289,460,831
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	138,763,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	22,536,952
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	300,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,977,622,983
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,500,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,773,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,841,728,035
0.0	391111	Ekuitas	0	25,969,887,937
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,485,000	0
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,592,247,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,368	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	120,707,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	43,567,246	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	45,335,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,925,017	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	99,649,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	119,102,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	50,495,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	519,690,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,257	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 16/07/25 1:40 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 7:39 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	39,348,000	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	13,270,374	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	45,090,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	39,106,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	28,337,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	16,306,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	5,547,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,742,341,530	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	531,099,313	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	542,361,679	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	57,954,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	988,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,890,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,345,123,600	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	122,863,516	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	116,677,649	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	63,627,567	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,838,874	0
3.0	522141	Beban Sewa	21,666,667	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	486,363,700	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173,015,752	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	265,154,072	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,519,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,343,883	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,342,767,387	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	157,957,394	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36,685,591	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	13,131,301	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,743,031	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,901,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	460,655,139	0
JUMLAH			**111,816,276,247**	**111,816,276,247**

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0600**	**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA	**: 065135**	**PANGKALAN PSDKP LAMPULO**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/07/25 8:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 18/7/25 2:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,501,842,000	2,491,450,000	1,417,150,000	0	1,417,150,000	56.88	1,074,300,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	42,000	19,156	0	19,156	45.61	22,844
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	187,992,000	187,388,000	107,468,040	0	107,468,040	57.35	79,919,960
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	66,276,000	66,332,000	38,760,848	0	38,760,848	58.43	27,571,152
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	31,680,000	15,480,000	0	15,480,000	48.86	16,200,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	70,490,000	69,730,000	40,280,000	0	40,280,000	57.77	29,450,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	952,000	13,216,000	12,944,071	67,712	12,876,359	97.43	339,641
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133,836,000	133,836,000	88,714,500	0	88,714,500	66.29	45,121,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	216,000,000	216,000,000	119,102,000	0	119,102,000	55.14	96,898,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	74,760,000	75,500,000	44,965,000	0	44,965,000	59.56	30,535,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,284,950,000	3,285,174,000	1,884,883,615	67,712	1,884,815,903	57.37	1,400,358,097
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	808,416,000	808,416,000	461,947,200	0	461,947,200	57.14	346,468,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28,000	28,000	9,110	0	9,110	32.54	18,890
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	57,638,000	58,148,000	34,976,000	0	34,976,000	60.15	23,172,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,650,000	20,650,000	11,795,888	0	11,795,888	57.12	8,854,112
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,140,000	70,140,000	40,080,000	0	40,080,000	57.14	30,060,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	51,276,000	51,276,000	34,761,600	0	34,761,600	67.79	16,514,400
511628	Belanja Uang Makan PPPK	48,000,000	48,000,000	28,337,000	0	28,337,000	59.04	19,663,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,056,148,000	1,056,658,000	611,906,798	0	611,906,798	57.91	444,751,202
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	71,544,000	71,544,000	16,306,000	0	16,306,000	22.79	55,238,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	14,592,000	14,592,000	5,547,000	0	5,547,000	38.01	9,045,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	86,136,000	86,136,000	21,853,000	0	21,853,000	25.37	64,283,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,014,276,000	3,017,256,000	1,742,341,530	0	1,742,341,530	57.75	1,274,914,470
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,057,602,000	1,053,888,000	531,099,313	0	531,099,313	50.39	522,788,687
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,071,878,000	4,071,144,000	2,273,440,843	0	2,273,440,843	55.84	1,797,703,157
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,499,112,000	8,499,112,000	4,792,084,256	67,712	4,792,016,544	56.38	3,707,095,456
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,671,542,000	1,236,345,000	472,093,179	0	472,093,179	38.18	764,251,821

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0600**	**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA	**: 065135**	**PANGKALAN PSDKP LAMPULO**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/07/25 8:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 18/7/25 2:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	266,902,000	266,902,000	57,954,400	0	57,954,400	21.71	208,947,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,300,000	838,000	0	838,000	4.58	17,462,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138,560,000	138,560,000	44,890,000	0	44,890,000	32.4	93,670,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	232,800,000	272,800,000	0	0	0	0	272,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,327,804,000	1,932,907,000	575,775,579	0	575,775,579	29.79	1,357,131,421
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,386,095,000	12,904,965,000	2,343,273,600	0	2,343,273,600	18.16	10,561,691,400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,730,000	13,730,000	0	0	0	0	13,730,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	898,228,000	955,778,000	122,863,516	0	122,863,516	12.85	832,914,484
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,298,053,000	13,874,473,000	2,466,137,116	0	2,466,137,116	17.77	11,408,335,884
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	138,000,000	8,585,500	0	8,585,500	6.22	129,414,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	203,000,000	138,000,000	8,585,500	0	8,585,500	6.22	129,414,500
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	387,600,000	379,860,000	124,558,265	0	124,558,265	32.79	255,301,735
522112	Belanja Langganan Telepon	164,400,000	164,400,000	76,634,161	0	76,634,161	46.61	87,765,839
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	18,000,000	2,597,523	0	2,597,523	14.43	15,402,477
522141	Belanja Sewa	245,440,000	245,440,000	15,000,000	0	15,000,000	6.11	230,440,000
522151	Belanja Jasa Profesi	61,700,000	61,700,000	0	0	0	0	61,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	686,943,000	1,384,630,000	426,207,700	0	426,207,700	30.78	958,422,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,564,083,000	2,254,030,000	644,997,649	0	644,997,649	28.62	1,609,032,351
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	507,835,000	557,235,000	7,000,000	0	7,000,000	1.26	550,235,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,477,876,000	1,308,354,000	170,275,640	0	170,275,640	13.01	1,138,078,360
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	828,500,000	775,752,000	6,800,000	0	6,800,000	0.88	768,952,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,814,211,000	2,641,341,000	184,075,640	0	184,075,640	6.97	2,457,265,360
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,669,359,000	2,730,590,000	251,981,072	0	251,981,072	9.23	2,478,608,928
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	186,630,000	190,720,000	3,519,000	0	3,519,000	1.85	187,201,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,300,000	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	513,077,000	424,956,000	31,343,883	0	31,343,883	7.38	393,612,117
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,404,366,000	3,378,766,000	286,843,955	0	286,843,955	8.49	3,091,922,045
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24,611,517,000	24,219,517,000	4,166,415,439	0	4,166,415,439	17.2	20,053,101,561
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0600**	**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA	**: 065135**	**PANGKALAN PSDKP LAMPULO**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/07/25 8:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 18/7/25 2:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420,268,000	420,268,000	19,191,000	0	19,191,000	4.57	401,077,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	420,268,000	420,268,000	19,191,000	0	19,191,000	4.57	401,077,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,378,725,000	1,378,725,000	0	0	0	0	1,378,725,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,478,725,000	1,478,725,000	0	0	0	0	1,478,725,000
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	392,000,000	0	0	0	0	392,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	392,000,000	0	0	0	0	392,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,898,993,000	2,290,993,000	19,191,000	0	19,191,000	0.84	2,271,802,000
	JUMLAH BELANJA	35,009,622,000	35,009,622,000	8,977,690,695	67,712	8,977,622,983	25.64	26,031,999,017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0600**	**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA	**: 065135**	**PANGKALAN PSDKP LAMPULO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/07/25 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000	0	1,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,500,000	0	1,500,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,500,000	0	1,500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,500,000	0	1,500,000	